

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi dan Pemikiran Abdurrahman Wahid

1. Kelahiran Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, seorang tokoh ulama besar di Nahdlatul Ulama yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lahir Abdurrahman ad-Dakhil. Barton mengungkapkan, telah menjadi tradisi sendiri bagi muslim Jawa untuk menggunakan namanya sebagai nama akhir anaknya yang menandakan sebagai putra. Seperti Abdurrahman Wahid, diartikan bahwa Abdurrahman putra Wahid. Sama seperti sang ayah, Wahid putra Hasyim. Nama lahir Gus Dur, ad-Dakhil memiliki arti sang penakluk. Dalam tradisi Islam, dikenal bahwa nama adalah doa. Maka dengan memberi nama tersebut, sang ayah berharap anaknya mampu menjadi seorang penakluk. Nama ad-Dakhil sendiri adalah nama seorang tokoh dari Dinasti Umayyah yang membangun peradaban kejayaan Islam di Spanyol.¹

Terkait kelahirannya, Gus Dur lahir di Denanyar dekat Jombang, Jawa Timur. Tepatnya di rumah pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, Kyai Bisri Syansuri. Beliau adalah anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholehah.

Gus Dur terkenal sebagai pribadi ulama yang kontroversial. Bukan hanya mengenai pemikirannya saja, tetapi juga mengenai kelahirannya. Kelahiran Gus Dur meskipun telah jelas tempatnya, namun tanggal lahir Gus Dur sering membuat pertanyaan. Hari kelahiran Gus Dur sering diperingati pada 4 Agustus. Meskipun slalu dirayakan pada tanggal masehi tersebut, sebenarnya tanggal kelahiran Gus Dur mengacu pada penanggalan hijriah.

Hari lahir tanggal 4 bulan kedelapan dalam penanggalan hijriah menunjukkan kelahiran Gus Dur pada 4 Sya'ban. Bila dihitung secara masehi, maka hari kelahiran Gus Dur jatuh pada 7 September 1940. Kesalahan tanggal lahir ini didasarkan pada petugas pencatatan sipil yang mencatatkan hari kelahiran Gus Dur sebagai 4 Agustus. Ibu beliau kala itu

¹ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm.35.

menguasai aksara Arab namun tidak mengerti aksara alfabet sehingga beliau tidak mengurus kesalahan tanggal tersebut.² Putri Gus Dur, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa hari kelahiran Gus Dur yang asli memang 7 September. Sedangkan hari kelahiran yang legal atau tercatat di dokumen kependudukan adalah 4 Agustus.³

Panggilan Gus menunjukkan bahwa beliau adalah anak kyai. Pemanggilan tersebut didasarkan dari tradisi Jawa yang artinya mas atau kakak, disematkan pada keturunan pemuka agama. Ayah beliau, Wahid Hasyim adalah anak dari K.H. Hasyim Asy-ari yang merupakan pendiri pesantren Tebu Ireng dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Sedangkan ibu beliau, Hj. Sholehah adalah anak dari Kyai Bisri Syansuri, salah seorang tokoh ulama NU dan pendiri pesantren Denanyar Jombang. Dengan demikian membuat Gus Dur lahir dan besar dalam lingkungan NU, organisasi Islam besar di Indonesia. Pemikiran Gus Dur pun selalu didasarkan pada pemahaman Islam dan NU.

2. Perjalanan Intelektual

Gus Dur kecil pada 1944 harus pindah dari Jombang ke Jakarta mengikuti lokasi kerja ayahnya, Wahid Hasyim yang ditugaskan sebagai ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi dibentuk pada 24 Oktober 1943 sebagai badan federasi yang menampung semua organisasi Islam di Indonesia semasa pendudukan Jepang. Berdirinya federasi tersebut menggantikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai perhimpunan organisasi Islam pada masa pendudukan Belanda.⁴

Singgahnya Gus Dur di Jakarta hanya sebentar karena beliau kembali ke Jombang selama perang kemerdekaan berlangsung. Hingga pada akhir perang, tepatnya tahun 1949, Gus Dur kembali pindah ke Jakarta karena sang ayah dipilih

² Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm.25.

³ Riski Nurmansyah, "di Balik 'Kontroversi' Ulah Gus Dur yang jadi Trending Tropic," suara.com, 2017, <https://www.suara.com/news/2017/09/07/170908/di-balik-kontroversi-ultah-gus-dur-yang-jadi-trending-topic?page=all>.

⁴ Syamsul Dwi Maarif, "Sejarah Partai Masyumi, Daftar Tokoh, & Kenapa Dibubarkan Soekarno?," Tirto.id, 2021, <https://tirto.id/sejarah-partai-masyumi-daftar-tokoh-kenapa-dibubarkan-sukarno-gbL9>.

menjadi Menteri Agama pertama pada kabinet presidensiil (19 Agustus 1945 – 14 November 1945) dan Kabinet RIS (20 September 1949 – 6 September 1950).⁵

Pendidikan pertama Gus Dur dilakukan bersama sang kakek di Pesantren Tebu Ireng Jombang. Bersama sang kakek, Gus Dur belajar Al-Quran hingga pada usia anak-anak beliau telah fasih membacanya. Berkat K.H. Hasyim Asyari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama yang sering didatangi oleh tokoh politik dan ulama kenamaan maka Gus Dur kecil pun telah mengenal banyak tokoh.⁶

Ketika pindah ke Jakarta saat ayahnya ditunjuk menjadi Menteri Agama, Gus Dur bersekolah di SD KRIS sebelum akhirnya pindah ke SD Matraman Perwari.⁷ Semasa sekolah dasar inilah Gus Dur mendapat pengetahuan dari ayahnya yang menguasai banyak bahasa. Meskipun menjabat sebagai menteri, Wahid Hasyim masih menyempatkan diri untuk mendidik anaknya. Mulai dari bacaan buku non-muslim, koran, dan majalah. Sebab didikan dari ayahnya Gus Dur menjadi anak kutu buku. Ruang rumahnya dipenuhi bahan bacaan karena Gus Dur haus akan ilmu.

Wahid Hasyim mengajari Gus Dur tak hanya melalui buku dan bacaan. Melainkan juga kecerdasan sosialnya. Sang ayah sering mengajak Gus Dur sholat berjamaah di masjid. Selain sebagai ajang memperkuat iman Islam, sholat berjamaah di masjid juga menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi antar muslim di lingkungan. Kecerdasan sosial Gus Dur juga didukung oleh ayahnya yang sering mengikutkan Gus Dur dalam pertemuan dengan mahasiswa, tokoh agama, tokoh politik, termasuk dengan Munawir Ajadzali muda.⁸

Abdurrahman Wahid kecil adalah anak biasa dengan banyak tingkah kenakalan. Beberapa kali dirinya diikat tali tambang di tiang bendera di halaman depan rumahnya di

⁵ Putri Tania, “Perspektif Abdurrahman Wahid Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia” (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm.65.

⁶ Abdul Mujib, “Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Pendidikan Islam” (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

⁷ Tania, “Perspektif Abdurrahman Wahid Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia,” hlm.65.

⁸ Mujib, “Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Pendidikan Islam,” hlm.52.

kawasan Matraman akibat tingkah tidak sopan dan guyonannya yang berlebihan. Dirinya pernah dua kali mengalami patah tulang tangan di usia yang belum genap 12 tahun akibat sering terjatuh saat memanjat pohon. Meskipun nakal, ayahnya senang mengajak Gus Dur bertemu rekan. Wahid Hasyim menganggapnya sebagai hal penting bagi pertumbuhan putranya.⁹

Pemikiran yang timbul pada masa kanak-kanak Abdurrahman Wahid adalah pemikiran sekuler. Ini tidak terlepas dari sang ayah yang menyediakan beragam buku, koran, dan majalah bertema umum. Fondasi Islam Gus Dur memang telah ada saat belajar mengaji dengan kakeknya, namun di masa sekolah dasar ini Gus Dur lebih tekun dalam membaca buku bernada sekuler. Di kediamannya pula sang ayah menyediakan surat kabar yang diterbitkan orang Katholik dan non-Islam lainnya. Tidak seperti kediaman lain, rumah Wahid Hasyim memiliki perpustakaan pribadi. Wahid Hasyim memilikinya lantaran frustrasi dengan keadaan kultur pesantren dengan pemikiran sempit. Dirinya menginginkan anaknya berpengetahuan luas.¹⁰

Wahid Hasyim kehilangan jabatan sebagai Menteri Agama pada 1952 setelah lima kabinet menjabat. Meskipun begitu keluarganya masih menetap di Jakarta. Pada 18 April 1953, Abdurrahman Wahid menemani Wahid Hasyim pergi menghadiri rapat NU di Sumedang. Saat perjalanan tengah hujan lebat hingga mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi selip dan menabrak truk. Penumpang yang duduk di belakang, Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto terlempar ke luar. Sedangkan Abdurrahman Wahid dan sang sopir tidak mengalami luka parah. Wahid Hasyim menderita luka berat di kepala dan kening. Keesokan harinya, Wahid Hasyim dinyatakan wafat di usia 38 tahun pada tanggal 19 April 1953. Saat itu usia Gus Dur baru 12 tahun.¹¹

Pendidikan Gus Dur berlanjut di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Tanah Abang. Gus Dur pernah

⁹ Nurhidayah, "K . H . Abdurrahman Wahid: Analisis Terhadap Pemikiran Dan Peranan Politikanya Di Indonesia," hlm.13.

¹⁰ Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, hlm.42.

¹¹ Nurhidayah, hlm.15.

tidak naik kelas karena lebih tertarik mengejar pengetahuan yang tidak ada di sekolah. termasuk melakukan kegemarannya menonton pertandingan bola di televisi. Gus Dur menyangkal malasnya mengejar akademik karena trauma kehilangan sang ayah. Namun tidak dapat disangkal kepergian orang yang sangat dekat dengannya, melebihi kedekatannya dengan saudara lain, memengaruhi Gus Dur. Pada 1954, ibunya mengirim Abdurrahman Wahid ke Yogyakarta berpindah sekolah di SMEP. Meskipun pengelola sekolahnya adalah Gereja Katolik Roma, sekolah tersebut menggunakan kurikulum sekuler. Selagi mengenyam pendidikan setingkat SMP, dirinya menyempatkan nyantri di Pesantren Al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu.

Pada masa-masa remaja awal inilah Gus Dur juga memperdalam kemampuan bahasa asingnya. Orang yang berjasa mengembangkan kemampuan Abdurrahman Wahid berbahasa inggris adalah Ibu Rufi'ah. Beliau memotivasi muridnya itu untuk membaca buku bahasa inggris. Bacaan Gus Dur pun beragam, dari teori hingga novel. Melalui Ibu Rufi'ah pula Gus Dur mengenal buku bernada komunis, seperti *Das Kapital* karya Karl Marx. Selain lewat membaca (*reading*) Gus Dur juga mendengarkan (*listening*) melalui saluran radio *Voice of America* dan BBC London.¹²

Kemampuan bahasa arab Gus Dur diasah saat nyantri kepada KH. Ali Maksum. Di bawah bimbingan Kiai Ali Maksum, Gus Dur dididik dengan tegas tanpa melihat latar belakangnya sebagai seorang anak mantan menteri dan ulama terkemuka. Sebelumnya, dia telah paham bahasa asing seperti bahasa inggris dan sedikit bahasa arab. Dia juga mengerti tulisan Belanda dan Prancis. Namun di Yogyakarta barulah kemampuan bahasanya melesat.¹³

Setelah menyelesaikan studi di SMEP pada 1957, Gus Dur mulai belajar di Pesantren secara penuh. Dia mondok di Pesantren Tegalrejo Magelang hingga 1959. Di bawah naungan Kiai Khudori, Gus Dur cepat belajar pengetahuan Islam. Prestasinya cukup gemilang karena mampu menyelesaikan studi yang biasanya ditempuh selama 4 tahun

¹² Mujib, hlm.55.

¹³ Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, hlm.52.

hanya dengan 2 tahun. Di luar pendidikan Islam, Gus Dur masih mengejar pengetahuan dengan membaca buku barat. Gus Dur melanjutkan belajar di pesantren Tambakberas di bawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah pada 1959 sampai 1963. Pada masa belajar ini, Gus Dur didorong untuk mengajar dari tahun pertamanya nyantri. Dalam waktu 1950 hingga 1963 inilah terjadi pergulatan pemikiran barat dan Islam di diri Gus Dur. Dirinya mencoba membaca pemikiran dari sisi yang berbeda antara Islam tradisional dengan literatur barat.¹⁴

Abdurrahman Wahid melanjutkan studinya dengan mengambil beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pada 1963. Keadaan disana Gus Dur lebih banyak menyibukkan diri dengan mengunjungi perpustakaan, toko buku, serta berdiskusi dengan rekan dan cendekiawan lain. Gus Dur mendapat kesempatan untuk bebas mengembangkan intelektualnya. Namun kondisi kelas perkuliahan Gus Dur kurang menunjang perkembangan intelektualnya lantaran dimasukkan di kelas pemula yang masih belajar bahasa arab.

Perkembangan intelektual Gus Dur kembali terpacu setelah kepindahannya ke *Department of Religion* Universitas Baghdad pada 1966-1970 an. Disana dia kembali bersinggungan dengan bacaan Barat seperti karya Emil Durkheim. Gus Dur juga berkenalan dengan sastra dan budaya Arab, serta filsafat dan pemikiran sosial Eropa.¹⁵ Di Baghdad, Gus Dur bertukar pemikiran tentang sejarah dan tradisi kaum Yahudi bersama sahabatnya yang bernama Ramin, seorang pemikir liberal dari komunitas kecil Yahudi Iraq di Baghdad. Topik yang sering mereka bincangkan berkisar pada masalah agama, filsafat, dan politik.¹⁶ Pada tahun pendidikannya di Baghdad pula lah Gus Dur menikahi Nuriyah, tepatnya pada 11 Juni 1968. Prosesi akad nikah Gus Dur diwakilkan kakeknya, Kiai Bisyr Syansuri.¹⁷

¹⁴ Barton, hlm.53.

¹⁵ Mujib, "Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Pendidikan Islam," hlm.60.

¹⁶ Dedi Irwanto, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Telaah Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁷ Nurhidayah, "K . H . Abdurrahman Wahid: Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politiknya di Indonesia."

Meskipun studi di Baghdad berakhir pada tahun 1970, Gus Dur tidak langsung pulang ke Indonesia. Dia mencoba peruntungan belajar di Eropa. Sayangnya, Gus Dur tidak diterima hingga akhirnya memutuskan menjadi pelajar keliling yang berpindah dari satu kampus ke kampus lain. Dia menjalani kehidupan ini selama enam bulan. Keinginan Gus Dur untuk mengenyam pendidikan di McGill University juga tidak terwujud. Pada tahun 1971, Gus Dur memutuskan menyudahi perjalanannya mencari ilmu di Eropa. Saat kembali ke Indonesia dia baru melangsungkan resepsi pernikahan dengan Nuriyah. pernikahannya dengan Nuriyah dikarunia empat putri, yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (1973), Zannuba Ariffah Chafsoh Wahid (1974), Anita Hayatunnufus Wahid (1977), dan Inayah Wulandari Wahid (1982). Di tahun yang sama saat memutuskan pulang ke Indonesia, Gus Dur bergabung di Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari mengajar teologi dan ilmu agama. Kemudian di tahun 1974 dia menjadi sekretaris pesantren Tebuireng.¹⁸

3. **Pemikiran Ilmiah**

Masa kembalinya Gus Dur di Indonesia dihiasi dengan tulisan ilmiah dan kritik sosial. Selain mengenai persoalan sosial politik di masa itu, Gus Dur banyak mengungkapkan gagasannya tentang Islam dan masyarakat Indonesia. Gus Dur, sebagaimana kalangan santri Nahdlatul Ulama lainnya memiliki sikap primordialisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi lokal. Kondisi ketertutupan muslim kala itu yang sempat membuat frustrasi Wahid Hasyim hingga menyediakan buku bernada sekuler dan mengajak Gus Dur berdiskusi membuahakan hasil cemerlang. Gus Dur mengalami penggabungan pemikiran antara tiga dimensi keilmuan yang telah dijalaninya, yaitu Islam tradisional yang berakar dari keluarganya. Terutama dari sang kakek, Hasyim Asyari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia. Lingkungannya sedari kecil sangat dekat dengan kultur pesantren sehingga dapat dikatakan budaya Islam tradisional telah melekat pada darah daging Gus Dur.

¹⁸ UGM, "KH Abdurrahman Wahid," ugm.ac.id, diakses 23 Januari 2022, <https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/Islam/Paramadina/GusDur.html>.

Pondasi pemikiran Gus Dur di dapat dari dua sumber lain, yaitu budaya Timur Tengah dan dunia Barat. Perjalanan akademik Gus Dur di Kairo dan Baghdad memberi pengaruh penting terhadap perkembangan intelektual Gus Dur. Perjumpaannya dengan cendekiawan di Kairo membuka jendela wawasannya terhadap dunia Islam selain di Indonesia. Sedangkan di Baghdad Gus Dur memiliki kesempatan merasakan demokrasi yang diidam-idamkan melalui kebebasan mengungkapkan pendapat dan budaya inklusif. Pondasi pemikiran barat Gus Dur tidak lain paling pertama datang dari sang ayah. Melalui bacaan buku sekuler waktu SD, kemudian bersekolah di SMEP Gus Dur dapat membaca buku karangan pemikir terkenal Barat dan Eropa, seperti halnya pemikiran Karl Marx. Pemikiran Barat ini membuka Gus Dur pada gagasan modernisme dan rasionalisme.

Gus Dur termasuk cendekiawan yang peka terhadap kondisi. Kembalinya di Indonesia Gus Dur senantiasa mencari tahu tentang kehidupan pesantren, Islam di Indonesia, sampai kondisi pemerintahan Indonesia yang kala itu ada di kepemimpinan Soeharto (orde baru). Pergulatan pemikiran Gus Dur salah satunya dia tuangkan dalam majalah ilmu sosial Prisma yang menjadi wahana ternama para cendekiawan menuangkan tulisan kala itu. Gus Dur tergabung dalam Prisma pada 1975 hingga awal 1980-an. Pada masa itu, Prisma menjadi majalah untuk mengutarakan dan mendiskusikan masalah kondisi sosial pemerintahan di Indonesia.

Prisma adalah majalah yang didirikan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta. Majalah Prisma pada awal kemunculannya di tahun 1971 lebih berorientasi tentang masalah masyarakat Indonesia menyongsong modernisasi. Prisma dapat dikatakan melawan arus pemikiran tentang ideologi, pemikiran, filsafat, dan kebebasan pikir manusia seperti yang slalu menjadi fokus majalah di periode sebelumnya. Melainkan tentang masalah dan penyelesaiannya. Majalah ini membahas semua masalah mulai dari ekonomi, politik, hingga agama.

Majalah Prisma menunjukkan perubahan besar di tahun 1975 saat masyarakat kalangan cendekiawan mulai merasakan adanya ketimpangan dan masalah kritis dari orde baru. Karena

itu, arah tulisan di Prisma menjadi lebih menuju pada gerakan sipil, perkembangan negara, gerakan sosial keagamaan, ideologi, dan partai politik. Muncul pula tulisan yang mengarah pada penolakan tradisi dan agama karena keduanya dinilai menghambat manusia dalam melakukan modernisasi.

Abdurrahman Wahid hadir dalam majalah prisma mengutarakan gagasannya tentang Islam, negara, dan kehidupan sosial. Termasuk untuk melawan anggapan tradisi memperlambat modernisasi. Gus Dur sebagai seseorang yang lahir dan bersentuhan langsung dengan kultur tradisional memberi pemahaman komprehensif bahwa agama dan tradisi jika hadir maka akan tercipta perubahan progresif menuju modernisasi. Gus Dur menjelaskan cita-cita sekuler melalui segi religius. Sehingga anggapan keduanya saling bertolakbelakang dipatahkan.

Gus Dur turut memberikan pendapatnya tentang idealnya negara dengan demokrasi. Salah satunya yang termuat di Prisma adalah pemikirannya tentang integrasi nasional. Di mana Gus Dur menempatkan integrasi nasional ini sebagai langkah penyatuan cita antara rakyat dan pemerintah. Dalam negara demokrasi, pendapat rakyat dijunjung tinggi selaras dengan semboyannya dari, untuk, dan oleh rakyat. Maka Gus Dur mengharapkan adanya ekosistem yang baik bagi kebebasan berpendapat dan berkumpul. Gus Dur juga memberikan arahan bagi muslim untuk bergerak sesuai dengan ke-Islamannya untuk memajukan negara dengan ikut menjadi bagian dari integrasi nasional.

Selain tema di atas, Gus Dur juga membahas mengenai ideologi dan agama. Gus Dur dapat dikatakan hadir menjadi salah satu cendekiawan muslim pertama yang mengakui eksistensi Pancasila sebagai falsafah tunggal Indonesia. Melalui pemahaman mengenai ideologi dan agama, Gus Dur menaunkannya dengan tradisionalitas dan modernisasi. Dimana dalam argumennya, Gus Dur mengungkapkan bahwa semangat modernisasi dan Pancasila seperti pengakuan Hak Asasi Manusia, persatuan, demokrasi, dan musyawarah ada dan dapat terambil dari nilai-nilai agama. Maka agama dapat menjadi pijakan dalam melakukan modernisasi. Meskipun begitu, Gus Dur tidak mengungkapkan bahwa agama adalah satu-satunya jalan penyelesaian masalah negara.

Fokus tema Gus Dur juga membahas mengenai kultur pesantren dan ke-NU-an. Dirinya berusaha membumikan Islam tradisional pada masyarakat. Karena berasal dari keluarga yang kental akan tradisionalitas, bukan perkara sulit bagi Gus Dur untuk menafsirkan gerakan NU dan pesantren. Terutama ditautkan pada tema pembangunan dan negara. hemat Gus Dur, tradisi bukan penghambat modernisasi, melainkan menjadi pelengkap dan penguat modernisasi. Gus Dur sudah lebih dulu menerbitkan tulisannya tentang pesantren dalam majalah Kompas sejak tahun 1973. Tema sama juga diungkapkan Gus Dur dalam jumpa ilmiah dan seminar-seminar.¹⁹

Tulisan dan tindakan Gus Dur sering menyebabkan kontroversi. Oleh karenanya, Gus Dur oleh para peneliti terkenal sebagai cendekiawan yang kontroversial dan *nyeleneh*. Misalnya, dalam ragam tulisannya saat banyak cendekiawan menanyakan relasi antara agama dan modernitas serta anggapan agama sebagai penghambat modernitas, Gus Dur menampilkan bahwa sisi religiusitas mendukung terjadinya kemajuan. Perkembangan sekuler dan liberal dipandang oleh Gus Dur melalui segi ke-Islaman dan tradisionalitas layaknya corak Nahdlatul Ulama. Gagasan-gagasan yang diutarakan Gus Dur dapat menjadi kontroversial karena terlalu maju dari zamannya, atau setidaknya dapat dikatakan pemahaman masyarakat pada masa itu belum sampai. Layaknya gagasan tentang kemanusiaan dan ideologi yang menantang pemahaman masyarakat. Pemikiran Gus Dur yang slalu bersentuhan dengan Islam tidak membuat pemikiran tersebut lantas diterima kaum muslim seutuhnya. Banyak cendekiawan muslim pada masa itu menganggap Gus Dur terlalu liberal bahkan sekuler.

Tulisan Gus Dur adalah kumpulan reaksi terhadap kondisi sosial masa orde baru dan gagasan pembaharuan Islam. Tindakan Gus Dur menuangkan gagasannya dalam satu tulisan membuat dirinya mendapat sebutan komentator sosial. Sosoknya menjadi satu dari beberapa cendekiawan yang berani bersikap reaktif terhadap pemerintahan orde baru.

¹⁹ Hairus Salim HS, "Gus Dur Dan Kenangan Cendekiawan Zaman Prisma," in *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm.10-14.

Banyak tulisan Gus Dur bernada sindiran yang disamarkan dengan contoh kasus dan filosofi, sehingga pada waktu itu, kritik Gus Dur dinilai tidak mengancam orde baru. Meskipun begitu, kehadiran Gus Dur (dan Nahdlatul Ulama) menjadi *civil society* yang pada hakikatnya akan senantiasa melawan otoritarianisme Soeharto.²⁰

Tulisan Gus Dur tidak terpaud pada peraturan ilmiah apapun. Dirinya sebagai kontributor majalah dan mengirimkan tulisannya ke berbagai media tanpa menggunakan pijakan ilmiah seperti metode dan teoritis. Pengungkapan Gus Dur slalu bebas dan langsung pada isi atau diskusi. Tulisannya tidak mengacu pada penerapan teori atau penafsiran teori kembali. Melainkan berpatokan pada penyelesaian masalah sosial yang kreatif-transformatif dan inovatif. Ini dikatakan menganut pada kultur akademik pesantren yang memiliki kecenderungan untuk membumi dan reflektif pada realitas sosial. Kesulitan untuk memahami gagasan Gus Dur merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena banyak tulisan termuat di berbagai media dikumpulkan menjadi bunga rampai tanpa rekonstruksi dari Gus Dur sendiri.²¹

Marzuki Wahid mengklasifikasikan pemikiran Gus Dur ke dalam tujuh tema pokok, yaitu: pandangan-dunia pesantren, pribumisasi Islam, keharusan demokrasi, finalitas negara-bangsa Pancasila, pluralisme agama, humanitarianisme universal, dan antropologi kiai.²²

4. **Kiprah Abdurrahman Wahid**

Keterbukaan Gus Dur terhadap informasi dan pengetahuan baru tidak hanya berasal dari pribadinya yang gemar mencari hal baru dan berpetualang. Melainkan melalui asahan keluarga dan pengaruh lingkungan. Lahir di keluarga pendiri Nahdlatul Ulama dan ulama tersohor, Gus Dur sudah dihadapkan pada banyak orang sejak kecil. Terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang dan mengenal banyak tokoh kenamaan. Seperti turun temurun, Gus Dur mewarisi

²⁰ Marzuki Wahid, "Peta Intelektualisme Dan Tema Pokok Pemikiran Gus Dur," in *Gus Dur Di Mata Wong Cirebon*, 2010, hlm.72.

²¹ Wahid, hlm.76.

²² Wahid, hlm.78.

pengetahuan mengenai ke-NU-an tentang tradisionalisme Islam sedari kecil.

Pemikiran Gus Dur terbentuk mulai pengenalannya dengan banyak bacaan sekuler namun di saat yang sama mengaji Islam di pesantren. Kesenangan Gus Dur berpetualang juga mendukung spiritualisme dan semangat Gus Dur mencari ilmu pengetahuan, karena dirinya sudah terlepas dari keluarga sewaktu SMP dan terus berpindah-pindah pondok pesantren. Saat studi di luar negeri pun, Gus Dur banyak mendapat pengetahuan terbuka dan liberal. Kecintaannya pada pengetahuan mengantarkannya keliling Timur Tengah dan Eropa. Namun sayang cita-citanya di Eropa harus berhenti dan kembali ke Indonesia. Di saat kembalinya inilah, karir Gus Dur dimulai.

Abdurrahman Wahid banyak memegang jabatan penting baik di organisasi kemasyarakatan ataupun akademik. Karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Hasyim Asyari Jombang mengantarkannya menjadi Dekan di Fakultas Ushuluddin pada tahun 1972-1974.²³ Suatu kejadian yang unik dan *nyeleneh* karena dosen pada umumnya memiliki gelar S2, padahal Gus Dur tidak. Namun Gus Dur mampu menguasai materi dan mengajar.²⁴ Di tahun selanjutnya, tepatnya pada 1974-1980, Gus Dur memperoleh amanat sebagai sekretaris umum Pesantren Tebu Ireng. Pada masa-masa inilah banyak tulisan Gus Dur terbit. Dirinya berperan sebagai seorang kontributor dan komentator sekaligus berkeliling pesantren di tanah Jawa.

Karir Gus Dur di dunia Nahdlatul Ulama terjadi mulai pada 1980-1984 ketika menjabat sebagai katib Awwal PBNU. Karir ini dilanjut pada 1984-2000 Gus Dur terpilih menjadi Ketua Dewan Tanfidz PBNU. Di tahun ini pula, melalui Mukhtar NU ke 27 Tahun 1984 di Situbondo, Gus Dur terpilih menjadi ketua umum PBNU. Jabatan ketua umum terus dipertahankan sampai tahun 1999, atau selama 3 periode PBNU dipimpin Gus Dur. Di samping menahkodai PBNU,

²³ Umayah, "Gus Dur Sosok yang Disegani Masyarakat Indonesia," in *Gus Dur Di Mata Wong Cirebon* (Yogyakarta: Pilar Media, 2010).

²⁴ Lufaefi, "Menakjubkan! Gagal Kuliah S2, Gus Dur jadi Dosen Pascasarjana," akurat.co, 2020, <https://akurat.co/menakjubkan-gagal-kuliah-s2-gus-dur-jadi-dosen-pascasarjana>.

Gus Dur juga memegang jabatan strategis, diantaranya menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1987-1992 dan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada 1989-1993. Di tahun-tahun ini, Gus Dur sudah kurang produktif dalam menulis karena kesibukannya. Meskipun demikian sosoknya masih menjadi kontroversi lantaran ucapan yang dilontarkan dan tindakannya. Selain itu, Gus Dur juga bersitegang dengan orde baru karena dirinya yang memegang teguh nilai sehingga ketika bertentangan akan dilawannya. Termasuk dalam hal ini adalah orde baru yang tidak demokratis.

Ketika reformasi digulirkan, Gus Dur maju sebagai presiden RI ke empat menggantikan B.J. Habibie. Gus Dur terpilih melalui perhitungan suara yang dilakukan oleh MPR RI. Namun kepemimpinan Gus Dur hanya berlangsung selama tahun 1999-2001. Masa kepemimpinan singkat diisi oleh Gus Dur untuk menyelesaikan pekerjaan rumah menata pemerintahan pasca orde baru serta ancaman disintegrasi dan disharmoni di berbagai kalangan masyarakat. Pada masa kepemimpinan itu pula, banyak kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Gus Dur untuk menunjukkan keberpihakannya dan keseriusannya menangani isu perempuan dalam pemerintahan.

5. Pemikiran Abdurrahman Wahid

Marzuki Wahid memetakan pemikiran Gus Dur dalam tujuh tema pokok. Ketujuh tema ini merupakan sintesis dari pemikiran Gus Dur yang berorientasi pada *problem solving* dan pemetaan kondisi sosial, seperti banyak termuat dalam Prisma, majalah yang menitikberatkan pembahasannya pada pemecahan masalah sosial kkenegaraan. Tema-tema tulisan Gus Dur menunjukkan perhatiannya pada isu-isu global juga. Diantara isu global yang menjadi perhatian di abad ke-20 adalah Hak Asasi Manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan gender. Pembahasan semua isu tersebut dilakukan Gus Dur dengan mengelaborasikannya pada konsep Islam dan tradisionalitas.²⁵

²⁵ Wahid, "Peta Intelektualisme dan Tema Pokok Pemikiran Gus Dur."

Tabel 4.1. Tema Pokok Pemikiran Gus Dur (1970-an sampai 2000)

No.	Tema	Jumlah (tulisan)	Keterangan
1	Pandangan dunia pesantren	70	Pesantren dan modernisasi, pengembangan masyarakat
2	Pribumisasi Islam	43	Termasuk pembaruan Islam
3	Demokrasi	140	Memuat tentang <i>civil society</i> , pemberdayaan ekonomi, dan keIslaman
4	Finalitas Pancasila	73	Hubungan NU, agama, dan negara
5	Pluralisme agama	31	Islam terbuka, toleran, dan inklusif
6	Humanitarianisme universal	72	HAM, gender, dan lingkungan hidup
7	Antropologi kiai	24	Tulisan mengenai isu ini mayoritas berbentuk kolom

Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seorang pembaharu Islam. Figurnya disandingkan dengan Nurcholis Madjid dan Djohan Effendi mengenai gagasan post-modernisme Islam, sebuah konsep yang pertama kali dicetuskan oleh cendekiawan Pakistan, Falzur Rahman. Secara sederhana, post-modernisme Islam diartikan sebagai gerakan intelektual yang memperbaharui pemahaman modernisme Islam disamping tetap mengapresiasi keberadaan kearifan lokal. Selayaknya pertimbangan hukum Islam, perumusan gagasan dalam post modernisme tetap menggunakan ijtihad dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal sebagai langkah awal pertimbangannya.²⁶

Sebelum menuju lebih jauh, perlu diketahui post modernisme Islam mengharapkan terciptanya lingkungan sosial bermasyarakat yang plural, inklusif, demokratis, serta menjamin adanya kebebasan bagi masing-masing individu untuk mengembangkan dirinya tanpa adanya kekangan dan mengurangi nilainya sebagai manusia. Gagasan ini mencoba untuk menambal dan memperbaiki cakupan isu yang

²⁶ Hairus Salim HS, "Abdurrahman Wahid's Reformation: Ideas and Strategies," in *Gus Dur on Religion, Democracy, and Peace* (Yogyakarta: gading publishing, 2018), hlm.xv.

menyeleweng atau kurang lengkap dalam gagasan tradisional, fundamentalis, dan modernis. Dengan demikian, post modernisme dilakukan dengan melihat kembali secara utuh dan menyeluruh semua nilai dalam Al Quran dan hadis untuk mendapatkan pemahaman lebih lengkap dan menunjang kemajuan umat. Rohmawati mengungkapkan masuknya post modernisme Islam di Indonesia terjadi pada awal 1970-an dengan Abdurrahman Wahid sebagai tokoh sentralnya.²⁷ Selain melalui tulisannya, Abdurrahman Wahid memiliki kesempatan besar untuk menerapkan pemikiran post-modernismenya pada masyarakat melalui jabatannya sebagai ketua umum PBNU dan presiden Indonesia. dengan wewenang politik yang dimiliki sebagai konsekuensi jabatan yang dimiliki, Gus Dur bisa membuat peraturan dan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan post modernisme.

Gagasan pemikiran Gus Dur yang dominan, seperti yang diungkapkan oleh Syaiful Arif terdiri dari tiga nilai, yaitu universalisme Islam, kosmopolitanisme Islam, dan pribumisasi Islam.²⁸ Nilai universalisme Islam mengisyaratkan bahwa nilai Islam ada dalam kemanusiaan dan usaha pemenuhan hak asasi manusia serta merupakan tujuan akhir dari Islam itu sendiri, yaitu kemaslahatan umat. Nilai mengenai Islam adalah universal bagi pelaksanaan kemanusiaan ini timbul sebagai respon dari humanisasi di Eropa. Pengakuan pada Hak Asasi Manusia (HAM) pada abad ke-20 memancing anggapan bahwa agama adalah doktrin yang menghambat kemanusiaan. Sedangkan melalui pemahaman universalisme ini, kemanusiaan sebenarnya ada dan menjadi tujuan dari Islam. Dalam hemat Gus Dur, universalisme Islam tampak dalam setiap ajaran agama Islam, ini termanifestasikan ke dalam praktis dan teori untuk mengatur kehidupan sosial. Meliputi hukum agama (fiqh), keimanan (tauhid), dan etika (akhlak).²⁹

²⁷ Yuyun Rohmawati, "Islam Dan Neo-Modernisme/Post-Modernisme(Perspektif Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid)" 20, no. 1 (2021): 60–71, <https://doi.org/10.18592/jjiu.v>, hlm.64.

²⁸ As'ad Said Ali, "Pengantar Ahli: Konstruksi Pemikiran Gus Dur," in *Humanisme Gus Dur* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2013), hlm.13.

²⁹ Hardika Saputra, "Universalisme Islam dalam Peradaban Islam Klasik dan Modern," researchgate, 2018,

Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kelaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan dan pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semuanya jelas menunjukkan kepedulian di atas.

...Salah satu ajaran dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fiqhiyyah) lama, jaminan dasar akan:

- 1) Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum;*
- 2) Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama;*
- 3) Keselamatan keluarga dan keturunan;*
- 4) Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum;*
- 5) Keselamatan profesi.³⁰*

Penjabaran di atas dapat dimaknai pandangan Gus Dur tentang politik dan demokrasi dalam pemikirannya tentang Islam. Agama Islam, menurut Gus Dur, telah memuat acuan untuk bersikap humanis, termasuk dalam hal ini dapat dimaknai sebagai upaya pemberian jaminan Hak Asasi Manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Tujuan dari pelaksanaan hukum adalah untuk menjamin kebaikan bagi umat dan hak-haknya sebagai manusia. Gus Dur mengungkapkan untuk menjamin kebaikan dan jaminan HAM maka diperlukan hukum formal yang memperlakukan masyarakat secara adil di muka hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan tersebut dengan membuat peraturan yang spesifik akan kesetaraan dan kebebasan warga masyarakat. Karena

https://www.researchgate.net/publication/332246108_Universalisme_Islam_Dalam_Peradaban_Klasik_dan_Modern.

³⁰ Wahid, "The Universalism of Islam and the Cosmopolitanism of Islamic Civilization," hlm.81-82.

hanya melalui kepastian hukum inilah masyarakat mampu mengembangkan persamaan hak dan standar hidup bagi semua warga negara.

Kedua, kosmopolitanisme Islam dalam hemat Gus Dur adalah elaborasi dari kultur Islam dan barat. Diartikan sebagai Islam yang terbuka dalam menerima pemikiran modern, termasuk yang berasal dari Eropa. Kosmopolitanisme Islam adalah sarana untuk mencapai universalisme Islam. Gagasan universalisme Islam yang termasuk baru harus didukung oleh nilai yang baru juga. Yaitu penerimaan atas budaya baru. Kedua nilai tersebut berhubungan dengan dunia global, sedangkan pribumisasi Islam bersifat lokal. Nilai ini dapat dimaknai menjadi dua hal, pertama dakwah dengan menggunakan simbol-simbol tradisi lokal. Dakwah dilakukan sesuai dengan kondisi *mad'u* dan nilai lokal yang menyelimutinya. Kedua, pribumisasi Islam sebagai upaya melokalkan gagasan baru untuk memperbaiki pengetahuan sesuai dengan tuntutan realita. Dengan begitu maka timbul hubungan timbal balik dimana universalisme Islam diterima oleh masyarakat dengan jalan pribumisasi Islam.³¹

Arif mengungkapkan ketiga nilai pemikiran Abdurrahman Wahid ini bila diambil intisari maka didapat nilai humanisme sebagai dasar pemikiran. Dalam nilai kemanusiaan ini, Gus Dur membedakan letak manifestasinya ke dalam dua hal. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pengembangan struktur masyarakat yang adil. Pada akhirnya, Gus Dur tidak hanya berupaya untuk melindungi segenap hak kemanusiaan masyarakat, melainkan dalam upaya melindungi tersebut turut hadir pula usaha pemberdayaan sehingga tercipta masyarakat adil. Dalam hal ini, upaya politik dan kultural dibutuhkan.

Gus Dur dalam melihat humanisme melalui sintesis dua pendekatan, yaitu pendekatan liberal dan pendekatan struktural. Pendekatan liberal menyangkut hak yuridis-politis yang hasil akhirnya adalah hak-hak sipil dan politik. pendekatan ini juga disebut sebagai hak negatif karena hak yang diberikan berkonotasi tidak boleh dilanggar. Contohnya, hak berpendapat tidak boleh dikekang. Pendekatan liberal terdapat dalam UUD 1945 pasal 28. Sedangkan pendekatan

³¹ Ali, "Pengantar Ahli: Konstruksi Pemikiran Gus Dur."

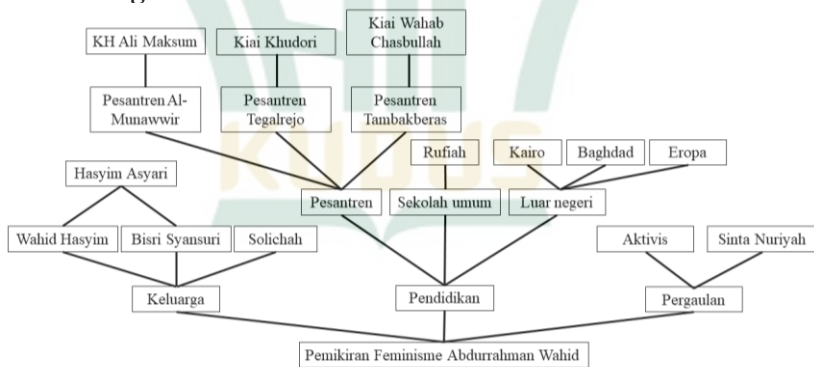
struktural adalah perpanjangan dari pendekatan liberal. Pendekatan ini disebut sebagai hak positif dengan pengakuan hak-hak masyarakat agar kehidupan bisa semakin manusiawi, cara mewujudkannya adalah dengan menciptakan struktur politik berkeadilan.

Nilai humanisme Gus Dur dalam pendekatan struktural, dimana dia melihat kewajiban negara untuk menyediakan kesempatan hukum yang setara bagi setiap individu. Artinya Gus Dur berpaham bahwa perlu dibuka jalan-jalan baru bagi setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Karena kedua pendekatan yang digunakan Gus Dur, melindungi HAM dan memberikan hak mengembangkan diri, maka humanisme Gus Dur adalah humanisme komunitarian. Diartikan bahwa Gus Dur tidak terhenti dalam pemberian jaminan perlindungan HAM semata. Namun juga penciptaan struktur politik berkeadilan sebagai wahana pengembangan diri secara setara bagi masyarakat.³²

6. Genealogi Pemikiran Feminisme Abdurrahman Wahid

Pada bagian ini penulis mengumpulkan informasi terkait sanad keilmuan Gus Dur. Alur sanad pemikiran ini bersumber dari berbagai literatur daring dan buku Biografi Gus Dur. Secara garis besar penulis akan mengungkapkan sanad keilmuan Gus Dur sebagaimana berikut ini:

Bagan 4.1. Sanad Keilmuan Abdurrahman Wahid



³² Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2020), hlm.287-292.

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (feminisme) berakar dari keluarganya. Pemikiran progresif Abdurrahman Wahid adalah hasil dari didikannya sejak kecil, yaitu sang ayah yang berjasa mengenalkannya pada buku-buku umum yang tidak bernafaskan Islam dan membuka wawasan Gus Dur terhadap pengetahuan baru. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah ulama NU kenamaan yang semasa hidupnya turut membuat gebrakan. Sisi progresif ditunjukkan beliau mulai dari usia 20-an, beliau mengenalkan pembelajaran umum dan bahasa asing di Pesantren Tebuireng. K.H. Wahid Hasyim termasuk dalam jajaran ulama yang mendukung keberadaan perempuan dalam ruang publik. Di masanya, saat pendidikan belum terlalu menjadi aspek penting bagi perempuan. Terutama di ranah hukum, perempuan masih dianggap tidak mumpuni dan secara hukum Islam tidak diperbolehkan menjadi hakim. Namun Wahid Hasyim menentang arus pemikiran dengan menerima murid perempuan pertama di Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA). Dengan demikian dirinya telah membuka jalan bagi perempuan untuk ikut andil dalam proses hukum di Indonesia.³³

Selain dari sang ayah, sang kakek dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri juga merupakan pembela hak-hak perempuan. Khususnya hak pendidikan perempuan yang pada masa itu tidak terlalu diperhatikan. Mulai tahun 1919, Kiai Bisri membuka kelas khusus santri putri di Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang. Keputusan Kiai Bisri dapat dipandang progresif lantaran menggunakan pendidikan perspektif gender yang tidak ada dalam pendidikan pesantren masa itu.³⁴ Kiai Bisri menjadi ulama pertama yang memperkenalkan pendidikan kaum perempuan.

Di tahun 1919, santri yang diterima oleh Kiai Bisri adalah anak tetangga yang diajarnya di beranda belakang rumah. Perjuangan pendidikan kaum perempuan oleh Kiai

³³ Syakir NF, "Gagasan Pembaruan KH Wahid Hasyim dalam Pendidikan Pesantren," NU online, 2020, <https://nu.or.id/nasional/gagasan-pembaruan-kh-wahid-hasyim-dalam-pendidikan-pesantren-ml2zy>.

³⁴ NU Lamongan, "Kiai Bisri Syansuri, Perintis Pendidikan Islam untuk Kalangan Perempuan," nulamongan.or.id, 2021, <https://nulamongan.or.id/2021/08/09/kiai-bisri-syansuri-perintis-pendidikan-islam-untuk-kalangan-perempuan/>.

Bisri berlanjut hingga di tahun 1927 beliau resmi menerima santri dari berbagai pelosok daerah. Kelas ini dapat dikatakan menjadi pertama di Indonesia, atau setidaknya di Jawa Timur. Kelas santri perempuan mampu berkembang dengan pesat dari yang hanya kelas menjadi Madrasah Diniyah pada 1930.³⁵

Kedua keluarga Gus Dur ini menimba ilmu dari KH Hasyim Asyari yang mendapatkan ilmu dari Syaikh Mahfudz at Tarmasi.³⁶

1. Syaikh Mahfuds at-Tarmasi (w. 1338 H/w. 1920 M)
2. Sayyid Abu Bakr Syatha (w. 1310 H/w. 1892 M)
3. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (w. 1304 H/w. 1886 M)
4. Syekh Utsman ibn Hasan ad Dimiyathi (w. 1265 H/w. 1849 M)
5. Syekh as Sanawani (w. 1233 H/w. 1818 M)
6. Syekh Isa bin Ahmad al Barawy (w. 1182 H/w. 1768 M)
7. Syekh Syamsuddin ad Dafary (w. 1161 H)
8. Syekh Salim bin Abdillah (w. 1160 H/w. 1747 M)
9. Syekh Abdullah bin Salim (w. 1134 H/w. 1722 M)
10. Syekh Syamsudin al Babily (w. 1077 H/w. 1666 M)
11. Syekh Ahmad al Ghunaimy (w. 1044 H/w. 1634 M)
12. Syekh Syamsudin ar Ramly (w. 1004 H/w. 1596 M)
13. Syaikh Zakaria al Anshory (w. 926 H/w. 1466 M)
14. Syekh Taqiuddin Muhammad (w.871 H/w. 1466 M)
15. Syekh Majduddin al-Fairuzabadi (w. 817 H/w. 1415 M)
16. Syekh Sirajuddin al Qaswiny (w. 750 H/w. 1349 M)
17. Syekh al-Qadhi Abu Bakr at Taftazany
18. Syekh Syarafuddin al Harawy
19. Syekh Fakhruddin ar Razy (w. 606 H/w. 1210 M)
20. Syekh Diyauddin ar Razy (w. 559 H/w. 1164 M)
21. Syekh Abul Qasim al Anshory (w. 512 H/w. 1118 M)
22. Imam al Haramayn al Juwainy (w. 478 H/w. 1085 M)
23. Syekh Abul Qasim al Asfarayini (w. 452 H/w. 1034 M)
24. Syekh Ruknuddin Abu Ishaq al Asfarayini (w. 418 H/w. 1027 M)

³⁵ Muhammad Sabilul Aslam, "KH Bisri Syansuri; Inisiator Pendidikan Pesantren Putri," pesantren.id, 2022, <https://pesantren.id/kh-bisri-syansuri-inisiator-pendidikan-pesantren-putri-11223/>.

³⁶ bangkitmedia, "Sanad Ilmu Hasyim Asy-ari Sampai kepada Rasulullah," bangkitmedia.com, 2021, <https://bangkitmedia.com/sanad-ilmu-kyai-hasyim-asyari-sampai-kepada-rasulullah/>.

25. Syekh Abul Hasan al Bahily
26. Raisu Ahlissunnah wal Jama'ah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H/w. 947 M)
27. Al-Hafidz Zakaria as-Sajy (w. 307 H)
28. Syekh al-Muzany (w. 264 H)
29. Imam Muhammad ibn Idris as Syafi'i (w.204 H/w. 819 M)
30. Imam Malik ibn Anas (w.179 H/w. 795 M)
31. Imam Nafi' (w. 117 H)
32. Abdullah ibn Umar (w. 73 H)
33. Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam

Ada peran para perempuan yang slalu ada di kehidupan Gus Dur. Lingkungan keluarga dan pergaulan ini turut menjadi sumber pemikiran feminisme Gus Dur, yaitu ibu, istri, dan anak-anaknya. Menyebut peran kesemuanya sebagai asal pemikiran dan gerakan feminisme Gus Dur penting dilakukan karena mereka adalah orang-orang pertama yang bersentuhan dan memengaruhi pemikiran Gus Dur. Ibu Gus Dur, Solichah, bukanlah seorang cendekiawan. Dirinya sama seperti perempuan pada masa itu dimana perempuan belum mendapat pendidikan yang sama. Namun dengan menjadi istri Wahid Hasyim, Solichah mampu mengikuti irama pemikiran dan gerakan suaminya. Karena itu, Solichah memiliki peran sama pentingnya dengan Wahid Hasyim.

Sepeeninggalnya Wahid Hasyim, Solichah dihadapkan dengan situasi yang jauh berbeda. Dirinya harus bekerja dan menghidupi keluarga kecilnya, disamping fokus dalam organisasi dan perkumpulan. Rekan Wahid Hasyim di NU dan perpolitikan cukup membantu Solichah dalam mengatasi masa-masa setelah berpulangnya yang suami. Mereka tetap berkunjung dan bercengkrama. Di samping itu, Solichah tumbuh menjadi seorang perempuan yang lebih mandiri dan menjadi tokoh berpengaruh. Solichah pula yang menghidupkan tradisi di keluarganya untuk terus memulai perdebatan bebas mengenai isu-isu terkini. Berkat dia pula, Gus Dur terus menggali wawasan melalui buku-buku.

Tidak mengherankan bagi Solichah untuk membebaskan tugas meneruskan pemikiran dan gerakan Wahid Hasyim pada Gus Dur. Berdasarkan tradisi Islam tradisional, khususnya Jawa, putra pertama akan menjadi penerus dari ayahnya.

Menganut pada pemahaman ini, Wahid Hasyim adalah putra pertama dari KH Hasyim Asyari yang melanjutkan perjuangan ayahnya. Sehingga Gus Dur sebagai putra Wahid Hasyim sudah sebaiknya meneruskan perjuangan sang ayah.³⁷

Beralih pada peran pendidikan yang dienyam Gus Dur terhadap pemikiran feminisnya, penulis menggarisbawahi tiga latar belakang pendidikan yang berperan penting. Yaitu tiga pesantren dengan kentalnya kultur Islam tradisional, sekolah umum terutama di SMEP Yogyakarta dimana Gus Dur bertemu Rufi'ah yang berperan mengenalkan Gus Dur pada bacaan barat-liberal, serta peran pendidikan Gus Dur di luar negeri.

Istri Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah juga menjadi salah satu orang yang sangat memengaruhi perspektif Gus Dur tentang kesetaraan gender dan feminisme. Kepekaan Sinta kepada isu gender dimulai saat bersekolah S1 di jurusan Qodlo, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian di jenjang S2 beliau mengambil program Kajian Wanita Universitas Indonesia. Beliau aktif berorganisasi seperti di Muslimat NU dan menjadi anggota Kowani.³⁸ Di masa ini beliau telah menikah dengan Gus Dur hingga rumah mereka sering dijadikan tempat diskusi masalah gender bersama banyak aktivis.

Saya mengenal Gus Dur dari istrinya, Sinta Nuriyah. Ketika itu ia menjadi mahasiswi di Kajian Wanita UI. Pertemuan dengan Gus Dur saya ingat waktu itu, pada tahun 1998, ketika beliau mengundang semua kelompok termasuk kelompok perempuan di rumahnya, Ciganjur. Saya belum menjadi aktivis waktu itu, dalam arti masih sebagai akademisi murni. Mereka yang ke rumah Gus Dur datang dari berbagai latar belakang, ada kelompok PKK, Dharma Wanita, LSM, Perguruan Tinggi, tentu juga organisasi agama dll. Kelompok perempuan ini

³⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm.47.

³⁸ Muhammad Naufal Alyaa, "Sinta Nutiyah, Istri Gus Dur yang Ternyata Banyak Terlibat pada Gerakan Perempuan di Indonesia," pikiran rakyat, 2021, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702427599/profil-shinta-nuriyah-istri-gus-dur-yang-ternyata-banyak-terlibat-pada-gerakan-perempuan-di-indonesia?page=2>.

sepenuhnya datang karena diundang Gus Dur, bukan karena mereka minta bertemu. Saya melihatnya ada nilai lebih pada Gus Dur yang memperhatikan kelompok perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Biasanya para tokoh berkumpulnya dengan kelompok partai atau kelompok tertentu.³⁹

Berdasarkan penuturan Saparinah Sadli tersebut, dapat diketahui bahwa Abdurrahman Wahid bersama sang istri, Sinta Nuriyah, memiliki ketertarikan yang kuat pada isu-isu perempuan. Diundangnya banyak aktivis dari berbagai kalangan juga menunjukkan asal pemikiran Gus Dur yang berasal dari luar, yaitu pengaruh aktivis. Peran aktivis dalam memupuk rasa kemanusiaan Gus Dur berkaitan dengan bertemunya gagasan-gagasan kemanusiaan dan fenomena sosial di masyarakat. Fakta dari fenomena sosial yang menggambarkan situasi nyata di masyarakat dibawa oleh para aktivis hingga Gus Dur bisa mengetahui kondisi permasalahan saat itu. Dengan begitu, maka aktivis perempuan punya peran penting membangun pemikiran Gus Dur tentang feminisme.

Lingkungan pergaulan Gus Dur tidak hanya terbatas pada umat muslim saja. Beragam kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang agama turut berdiskusi dengan Gus Dur. Jauh sebelum dirinya menjadi ketua PBNU dan mengenal banyak aktivis baik perempuan ataupun laki-laki, Gus Dur terbelah dahulu dikelilingi aktivis saat mendirikan Forum Demokrasi (Fordem). Perkumpulan yang digunakan untuk berdiskusi para cendekiawan dan aktivis pro demokrasi ini didirikan oleh Gus Dur pada awal dekade 1990. Dari forum diskusi ini banyak pembicaraan mengenai perempuan dalam realitas orde baru yang banyak mengekang kaum perempuan dengan ide domestifikasinya.⁴⁰

Beliau tidak pernah menyebut dirinya sebagai feminis. Tulisan beliau juga sedikit yang membahas fokus ke isu

³⁹ Saparinah Sadli, "Gus Dur Ada Hati Sama Perempuan," in *Gus Dur Di Mata Perempuan* (Yogyakarta: gading publishing, 2015), hlm.195.

⁴⁰ Indhara Musthofa, "Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Gus Dur," *UIN Maulana Malik Ibrahim* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm.98.

perempuan. Tetapi untuk di masanya 1970an memang sedikit orang yang membahas fokus ke isu perempuan dan Gus Dur memang sudah membahas itu meskipun tulisannya sedikit. Kalau feminis atau bukan beliau memang tidak pernah menyebut dirinya feminis. Tapi kalau lihat tulisan dan kebijakannya memang sudah terlihat kalau beliau fokus di isu perempuan.⁴¹

Gus Dur seperti dikatakan oleh Achidsti tidak pernah menyebut dirinya sebagai feminis. Pemikirannya hanya seputar isu perempuan. Namun demikian, pemikiran dan keputusan yang diambil Gus Dur mampu menunjukkan feminisme. Pada analisa akan penulis bahas mengapa Gus Dur yang tidak pernah menyebut dirinya feminis dapat dikatakan feminisme.

Lebih lanjut tentang pendapat Achidsti mengenai pemikiran Gus Dur yang didapat oleh penulis melalui wawancara via daring, dirinya mengatakan bahwa pemikiran Gus Dur selalu berlandaskan Islam.

Kalau dari tulisannya bernafaskannya Islam. Misalnya beliau mengatakan perempuan dan laki-laki itu dalam Islam itu dianggapnya sejajar. Bahkan dengan lima hak dasar itu sudah diperuntukkan untuk perempuan dan laki-laki. Bukan hanya untuk laki-laki saja tapi untuk perempuan juga. Jadi kalau ditanya misalnya Gus Dur itu feminis apa ya kalau dilihat dari tulisannya kembali lagi interpretasikannya melalui hadis, Al Quran, tidak hanya tekstual tapi kontekstual.⁴²

Melalui dua tulisan Gus Dur yang akan penulis bahas dalam bagian selanjutnya, akan tampak jika Gus Dur memiliki kepekaan tinggi terhadap isu perempuan dan senantiasa mendasarkan argumentasi pada agama Islam. Penulis turut setuju dengan pendapat Achidsti tidak lain karena berawal dari judul karya Gus Dur yang slalu menggunakan kata

⁴¹ Ashilly Achidsti, wawancara oleh penulis, 7 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁴² Ashilly Achidsti, wawancara oleh penulis, 7 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

“Islam”. Dengan demikian karya tersebut berawal dari pemikirannya tentang Islam.

B. Data Penelitian

1. Feminisme Islam dalam Karya Abdurrahman Wahid

Dari tahun 1970-an hingga tahun 2000 total telah ditemukan 493 tulisan Gus Dur. Banyak tulisan ini tersebar di berbagai media dan masih ada beberapa yang belum dipublikasikan.

Tabel 4.2. Jumlah Tulisan Gus Dur dengan Berbagai Bentuknya (Tahun 1970-an hingga Tahun 2000)⁴³

No	Bentuk Tulisan	Jumlah (buku)	Keterangan
1	Buku	12	Terdapat pengulangan tulisan
2	Buku terjemahan	1	Bersama Hasyim Wahid
3	Kata pengantar buku	20	-
4	Epilog buku	1	-
5	Artikel	41	-
6	Antologi buku	263	Di berbagai majalah, surat kabar, jurnal, dan media massa
7	Kolom	105	Di berbagai majalah
8	Makalah	50	Sebagian besar tidak dipublikasikan
Total		493 buku	

Perlu diketahui, Gus Dur jarang membahas mengenai feminisme dalam tulisannya, lebih banyak tulisan Gus Dur yang membahas kemanusiaan, hak asasi manusia, dan Islam. Hanya terdapat dua tulisan bertemakan feminisme yaitu Hak Asasi Wanita dalam Islam dalam buku Islam Kosmopolitan serta Islam dan Kepemimpinan Wanita dalam buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita.

⁴³ Wahid, hlm.75.

2. Feminisme Islam dalam Kepemimpinan Abdurrahman Wahid di PBNU

Gus Dur menjabat sebagai ketua umum PBNU selama tiga periode (1984-1999). Di bawah kepemimpinannya, terlaksana 3 kali Muktamar NU dan tiga kali musyawarah nasional alim ulama (Munas Alim Ulama). Dua muktamar di masa Gus Dur membahas peran perempuan dalam pembangunan dan organisasi, yaitu:

- 1) Muktamar NU ke-28 merumuskan Program Umum NU Masa Khidmah 1989-1994.
- 2) Muktamar NU ke-29 juga disebutkan Program Pokok Pengembangan NU 1994-1999 sektor perempuan

Sedangkan hanya satu Munas Alim Ulama yang menghasilkan kebijakan menyangkut perempuan, yaitu Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lombok pada 17-20 November 1997 dalam maklumat tentang “Kedudukan Perempuan dalam Islam (*makanatul mar’ah fil Islam*)”.

3. Feminisme Islam dalam Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden

Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden Indonesia ke empat dalam periode waktu yang singkat. Masa jabatannya berlangsung dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Dari kurun waktu tersebut Gus Dur mampu mengambil keputusan-keputusan penting yang tertuang dalam berbagai bentuk kebijakan.

Tabel 4.3. Jumlah Kebijakan yang Disahkan di Masa Presiden Abdurrahman Wahid⁴⁴

Jenis Kebijakan	Jumlah
Undang-Undang	6
PERPU	-
PP	76
Kepres/Inpres	45
GBHN	1
Total	127

⁴⁴ Kepustakaan Presiden, “Abdurrahman Wahid,” Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diakses 28 Maret 2022, https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/government_regulation/?box=list_245&search_jenis=UU&presiden_id=3&presiden=gusdur.

Dari total kebijakan tersebut, penulis menemukan Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan dasar bagi terciptanya kebijakan lain sehubungan dengan peran politik perempuan Indonesia. GBHN 1999-2004 untuk pertama kalinya Indonesia mengakui ketertinggalan perempuan dan bertekad mengubah dengan mengakomodasi keberadaan perempuan di setiap sektor pemerintahan. GBHN lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Sebagai konsekuensi dari tujuan pemberdayaan perempuan maka pemerintah melakukan strategi kebijakan pengarusutamaan gender. Implikasi yang ditimbulkan dari strategi tersebut adalah pembuatan kebijakan sebagai landasan hukum, dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Gus Dur mencoba menghadirkan perempuan dalam gender mainstreaming. Bukan lagi WiD, WaD dimana perempuan dilibatkan jadi subjek dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi. Turunannya UU minimal 30 persen perempuan. Itu kan salah satu landasannya Inpres Pengarusutamaan Gender.⁴⁵

Achidsti mengungkapkan Gus Dur, melalui GBHN mencoba menghadirkan perempuan ke dalam ranah politik, hal yang sebelumnya tidak memungkinkan di masa era Orde Baru. Dari kebijakan itu kemudian muncul berbagai kebijakan lain dengan mengakomodasi peran perempuan di dalamnya.

Dengan adanya pengarusutamaan gender, maka sebagai konsekuensi seluruh kebijakan di setiap lembaga diharuskan mengakomodasi perempuan. Penetapan Inpres di atas berimplikasi pada produk hukum di pemerintah pusat hingga daerah. Penulis menemukan bahwa semua lembaga kementerian di tingkat pusat memiliki keharusan untuk memasukkan pengarusutamaan gender dalam lembaganya. Seperti halnya pengarusutamaan gender di Kementerian Keuangan

⁴⁵ Ashilly Achidsti, wawancara oleh penulis, 7 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

(<https://www.kemenkeu.go.id/profil/pengarusutamaan-gender/>). Selain kebijakan tersebut, penulis juga menemukan kebijakan lain yang berpijak pada Inpres Pengarusutamaan gender, diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan.
- 4) Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), diterbitkan tahun 2012.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- 9) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

Beberapa peraturan diatas menunjukkan pentingnya kebijakan pengarusutamaan gender yang dibawa Gus Dur. Achidsti mengungkapkan dalam perumusan kebijakan sekarang, inpres pengarusutamaan gender masih menjadi rujukan bagi dasar pengakomodasian perempuan dalam politik.

Pentingnya bahkan sampai sekarang, karena itu seringnya jadi landasan kalau kita lihat sebelum

undang-undang itu kan ada menimbang itu kan salah satu landasannya. Contohnya UU PKDRT pasti menyebut inpres pengarusutamaan gender. Jadi sangat penting bahkan sampai saat ini. karena memang jadi landasan bagi perempuan di pembuatan kebijakan.⁴⁶

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Achidsti, kebijakan pengarusutamaan gender telah menjadi aspek penting dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Terutama mengenai pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. Dari pemerintahan pusat hingga daerah diintruksikan untuk ikut serta dalam usaha pengarusutamaan gender.

C. Analisa Data Penelitian

1. Feminisme Islam dalam Karya Abdurrahman Wahid

Pada bagian ini penulis akan mencoba menganalisis tulisan Abdurrahman Wahid berkaitan dengan feminisme. Perlu diketahui, Gus Dur jarang membahas mengenai feminisme dalam tulisannya, lebih banyak tulisan Gus Dur yang membahas kemanusiaan, hak asasi manusia, dan Islam. Hanya terdapat dua tulisan bertemakan feminisme yaitu Hak Asasi Wanita dalam Islam dalam buku Islam Kosmopolitan serta Islam dan Kepemimpinan Wanita dalam buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Melalui kedua tulisan tersebut penulis berusaha mencari tahu lebih dalam tentang pemikiran Gus Dur bila disandingkan dan dianalisis dari sisi feminisme. Penulis merasa perlu menempatkan pembahasan tulisan terlebih dahulu karena pemikiran teoritis Gus Dur dominan pada masa mudanya.

Arif memilah pembahasan mengenai Gus Dur menjadi dua era, yaitu Gus Dur muda dan Gus Dur sepuh. Gus Dur muda adalah masa dimana pemikirannya lebih menekankan sisi teoritis, sedangkan Gus Dur sepuh adalah yang telah berkecimpung di dunia PBNU dan politik praktis.⁴⁷ Setelah bagian ini, penulis akan menjabarkan kebijakan yang dikeluarkan saat Gus Dur memimpin, baik pada PBNU ataupun saat menjadi presiden.

⁴⁶ Ashilly Achidsti, wawancara oleh penulis, 7 Februari, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁴⁷ Arif, *Humanisme Gus Dur*, hlm.27.

Pemikiran feminisme Gus Dur sebagaimana pemikirannya terhadap konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia, selalu disandingkan dengan teologi Islam. Berkaitan dengan ini, penulis menggarisbawahi pemikiran Gus Dur yang memandang Islam telah memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja “*memang ada beberapa problematika yang tidak mudah dipecahkan*”.⁴⁸ Dalam Islam, menurut Gus Dur, ada hak-hak perempuan yang telah dipastikan sama derajatnya dengan hak laki-laki, yaitu lima hak dasar (*al-kulliyat al khams*). Ada pula hak-hak yang masih menjadi persoalan, yaitu perkara kepemimpinan, hak waris, dan ketidakadilan gender.

Penulis akan mulai memaparkan pemahaman feminisme Gus Dur mengenai teks keagamaan yang penulis anggap sebagai titik mulai membicarakan pemikiran feminisme Gus Dur. Hadis tersebut tertuang dalam kitab fiqh Syafi’iyah, *matn al-ghayah wa al-taqrib* karya Abu Syuja’ yang bunyinya امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن (*lan yuflih qawm wallaw amrahum imra-at*). Arti hadis tersebut adalah tidak akan pernah sukses sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan.

Gus Dur menawarkan pemahaman agama secara kontekstual, yaitu memahami ajaran teks agama berdasarkan kondisi latar belakang lingkungan dan masa. Mengenai hak perempuan dalam memimpin, Gus Dur mencermati pandangan konstitusional dan teologi. Menurutnya, keberadaan perempuan di pemerintahan, utamanya sebagai pemimpin, telah sesuai dengan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Ini karena “konstitusi negara manapun memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan wanita”. Seperti pemahaman Gus Dur mengenai demokrasi, setiap rakyat bersamaan kedudukannya di muka hukum, maka perempuan pun memiliki hak yang sama. Adapun menurut Gus Dur bahwa Islam adalah agama demokrasi, dibutuhkan reinterpretasi lebih lanjut antara Islam dan demokrasi sehingga mampu tercapai keadilan dalam masyarakat sesuai konstitusi.

⁴⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: Wahid Institute, 2007).

...agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangan mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antara sesama umat manusia...⁴⁹

Sebagai konsekuensi dari pandangan Gus Dur tentang agama dan demokrasi tersebut, maka Gus Dur secara penuh mendukung adanya hak-hak konstitusional yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian maka pemikiran feminisme Gus Dur didapat dari pandangannya mengenai demokrasi. Lebih jauh lagi, pemikiran feminisme Gus Dur didasarkan pada humanisme Islam dan universalisme Islam. Seperti telah diungkap oleh Anwar, Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang memformulasikan pembaruan pemikiran untuk mereformasi hukum Islam. Adapun usaha reformasi yang dilakukan Gus Dur adalah melalui pribumisasi universalisme Islam. Pada tahap ini, Anwar menganggap adanya formulasi Islam sebagai sistem nilai etika oleh Gus Dur sudah menghasilkan pemahaman Islam yang ramah gender dan menganggap antara laki-laki dan perempuan adalah sama.⁵⁰

Nilai etika yang dimiliki oleh Gus Dur menurut Khasanah dibedakan menjadi tiga, yaitu etika politik, etika sosial dan ekonomi, dan etika agama. Ketiga nilai tersebut berbeda namun memiliki keterkaitan satu diantaranya. Terkait pemikiran feminisme Gus Dur, penulis menemukannya dalam nilai etika politik dan etika sosial. Nilai etika politik Gus Dur meliputi dua hal, yaitu penggunaan akal demi kepentingan bersama dan prinsip keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan nilai etika sosial Gus Dur ditunjukkan melalui kepeduliannya terhadap Hak Asasi Manusia.

Pandangan teologis Gus Dur mengenai kepemimpinan perempuan lebih menekankan pada segi kontekstualitas, teks agama dibaca dan dipahami sesuai dengan kondisi bersangkutan. Dalam hemat Gus Dur, tidak direstunya perempuan untuk menjadi pemimpin dalam teks agama berkaitan dengan masa turunnya teks tersebut. Bagi Gus Dur

⁴⁹ Wahid, hlm.287.

⁵⁰ Anwar, *Feminisme Islam*, hlm.228.

“hadis semacam itu hanya berlaku pada zamannya”.⁵¹ Tidak bolehnya perempuan berkaitan dengan realitas masyarakat Arab dahulu menganggap pemimpin sebagai segalanya, kepala pemerintahan, pemimpin perang, pengelola ekonomi dan keuangan, hakim, dan pengatur keamanan. Sehingga hanya ada pemimpin tunggal yang mengatur keseluruhan urusan suku dan pemimpin seolah menjadi kepribadian yang melekat. Alasan-alasan tersebut yang membuat hadis tidak diperbolehkannya perempuan memimpin.

Dua esai Gus Dur tentang feminisme sama-sama membahas kepemimpinan perempuan. Dapat dipahami masalah kepemimpinan perempuan di masa Gus Dur muda sangat krusial dibahas. Ini berkaitan dengan penggunaan teks agama untuk mengurangi nilai perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang utuh dan warga negara yang memiliki hak sama. Gus Dur memiliki sensitifitas terhadap isu-isu perempuan di Indonesia, salah satunya dengan mengerti adanya politisasi agama melalui penggunaan ayat 34 surah An-Nisa oleh partai politik Islam untuk menyatakan larangan pemimpin perempuan.

Gus Dur melalui tulisannya dapat dinilai sebagai seorang feminis. Hal ini didasarkan pada ciri-ciri feminis yang diungkapkan oleh Anwar. *Pertama*, sensitivitas Gus Dur terhadap isu perempuan ditunjukkan melalui gagasan bertema kepemimpinan perempuan dan masalah dari ketimpangan yang terjadi. Selain itu, Gus Dur berhasil menjelaskan kebutuhan akan adanya reinterpretasi ayat sesuai dengan perkembangan zaman atau kontekstual. Terhadap masalah boleh tidaknya perempuan memimpin, Gus Dur dalam kedua esainya konsisten menjelaskan asal usul dan kejadian era sekarang.

Pada *Hak Asasi Wanita dalam Islam*, Gus Dur hanya sekilas membahas kepemimpinan perempuan, ini karena secara keseluruhan tulisan berisi masalah-masalah yang menimpa perempuan karena salah satu diantaranya pemahaman agama yang salah. Seperti hak waris, kewajiban suami istri, dan kritik pada lesbian. Tulisan tersebut berfokus pada penyelesaian masalah dan identifikasi masalah ketimpangan. Dalam esainya Gus Dur menunjukkan pentingnya upaya

⁵¹ Wahid, *Islam Kosmopolitan*, hlm.377.

menyadarkan laki-laki atas hak persamaan dan keadilan perempuan yang selama ini disuarakan gerakan feminisme. Dengan demikian, Gus Dur turut menggambarkan realitas budaya dimana laki-laki “punya *privilege* sangat tinggi dan tidak ingin kehilangan *privilege*” serta budaya patriarki yang menyebabkan laki-laki “tidak mau kehilangan posisi dominannya”.

Sedangkan dalam esai lainnya, Gus Dur fokus memaparkan kepemimpinan perempuan perspektif Islam. Dengan pemicu utama politisasi ayat untuk membenarkan tidak bolehnya perempuan memimpin. Gus Dur menjelaskan menggunakan cerita pengalamannya bertemu dengan seorang ulama Pakistan. Dari pertemuan itu pula memantik Gus Dur menjelaskan makna hadis “Tidak akan pernah sukses sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita”. Hadis tersebut melatarbelakangi ulama Pakistan untuk datang meminta agar Gus Dur mendoakan Pakistan selamat lantaran saat itu jabatan perdana Menteri dipegang oleh Benazir Bhutto yang merupakan perempuan.

Terkait dengan pemaknaan hadis, feminisme Islam salah satunya memang terfokus pada kesadaran makna teks agama yang patriarkal. Hadis yang penulis kutip dalam paragraf sebelumnya adalah teks agama yang populer digunakan untuk tidak memperbolehkan perempuan memimpin. Dasar ini diikuti dengan alasan-alasan seperti dasar emosi dan sifat perempuan yang subjektif sehingga tidak memungkinkan mengambil keputusan dengan benar. “Perempuan punya kekurangan dalam akal dan agama” adalah hadis yang mengikuti larangan kepemimpinan perempuan.⁵²

Ulama sendiri terbagi menjadi tiga pandangan terhadap pemaknaan hadis celakanya kaum yang dipimpin oleh perempuan. *Pertama*, pandangan yang menyatakan tidak layak perempuan memegang jabatan apapun dan mengurus urusan apapun. *Kedua*, pandangan yang menganggap hadis ini merujuk hanya untuk melarang perempuan menjadi pemimpin tinggi (khilafah), bukan kepemimpinan dalam konteks lain. *Ketiga*, pandangan menolak konsekuensi hukum hadis. Ulama

⁵² Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2002), hlm.42.

lainnya membagi pendapatnya ke dalam dua pandangan. Pertama, sama sekali tidak menerima hadis tersebut karena bertentangan dengan prinsip anti diskriminasi dalam Islam. *Kedua*, mengkritisi dan memberikan tafsir yang lebih netral.⁵³ Dalam hal ini tampak Gus Dur memiliki pandangan mengkritisi hadis. Ini karena Gus Dur mengungkapkan gagasan tentang perbedaan kultur di masa Rasulullah dengan keadaan politik pemerintahan sekarang.

Gus Dur menjelaskan, pemahaman tidak membolehkan perempuan memimpin atau celaknya kaum jika dipimpin perempuan ada karena pemahaman secara tekstual dan apa adanya. Pemahaman teks agama secara apa adanya ini mengakibatkan beberapa ulama berpandangan perempuan tidak pantas memiliki kepemimpinan politik. Gus Dur menunjukkan telah terjadi bias gender dalam interpretasi teks agama hingga menyebabkan perempuan dianggap hanya untuk menjaga harta suami. Beliau turut mengungkapkan beberapa tafsir misoginis sebagai hasil pemahaman tekstual. Sikap Gus Dur melalui tulisan ini mengisyaratkan kepekaan terhadap isu perempuan. Di saat yang sama, kesadaran adanya tafsir misoginis juga menginspirasi kaum muslim untuk memulai gerakan feminisme Islam. Sulitnya mengubah pandangan orang tentang interpretasi Islam tersebut dianggap Gus Dur sebagai salah satu penyebab ketimpangan gender.

Kedua, memiliki kepekaan terhadap perbedaan kebutuhan perempuan dan bertekad untuk mengubah keadaan. Ini ditunjukkan oleh Gus Dur melalui tulisannya yang mengimbau agar masyarakat dan ulama memperluas wawasan mengenai isu perempuan. Dengan harapan nantinya “akan ada pengakuan terhadap posisi wanita dalam Islam secara wajar”. Tekad Gus Dur untuk mengubah keadaan tidak ditunjukkan melalui tulisannya, melainkan dari kepemimpinannya atau di masa Gus Dur sepuh. Pada bagian selanjutnya penulis akan membahas usaha-usaha Gus Dur yang menunjukkan jika dirinya adalah feminis.

Ciri feminis lain adalah pembacaan terhadap dialektika budaya dan agama, pada tataran ini Gus Dur slalu

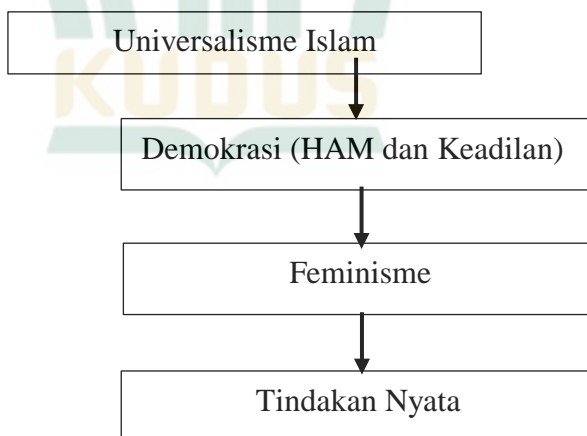
⁵³ Swararahima, “Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan,” Swara Rahima, 2018, <https://swararahima.com/2018/11/21/hadis-hadis-tentang-kepemimpinan-perempuan/>.

mengungkapkan gagasannya dengan menyandarkan pada agama dan sensitif pada budaya yang melanggengkan ketimpangan gender. Gus Dur melihat adanya pembangunan sosial yang mengarah pada ketimpangan, yaitu dari segi pembangunan oleh pemerintah dan pembangunan oleh agama. Kenyataan pada era orde baru disadari oleh Gus Dur telah menarik masuk perempuan ke ranah domestik sehingga memberi implikasi buruk bagi kemajuan perempuan. Untuk itu Gus Dur menyarankan agar ada langkah koreksi. Sedangkan pembangunan dari sisi agama berasal dari pemahaman kaku yang telah berlaku berabad-abad.

Pengungkapan pemahaman agama yang keliru selaras dengan yang diungkapkan Mulia. Dalam studi gender agama sering dianggap sebagai sumber diskriminasi perempuan. Hal ini, menurut Mulia karena adanya interpretasi yang dipengaruhi budaya patriarki. Sehingga demikian, sensitifitas terhadap kenyataan interpretasi agama yang patriarki dan misoginis adalah modal utama munculnya feminisme Islam.

Pemikiran feminisme Islam Gus Dur berakar pada pemahamannya tentang agama Islam secara menyeluruh. Tepatnya mengenai nilai-nilai universalisme Islam yang mengandung keadilan dan persamaan. Sebagai konsekuensi dari nilai universal tersebut, penegakan demokrasi menjadi hal yang dinilai perlu untuk menjamin terjadinya keadilan.

Bagan 4.2. Alur pemikiran feminisme Gus Dur



Alam pemikiran Gus Dur dimulai dari universalisme Islam. pemahaman bahwa Islam telah meliputi seluruh kehidupan manusia dengan adanya nilai-nilai jaminan kemanusiaan adalah pijakan utama Gus Dur dalam memikirkan masalah dinamika sosial. Adapun moralitas Gus Dur yang demikian tidak dapat dipungkiri hadir karena adanya masalah sosial. Baginya, masalah ketimpangan gender di Indonesia diakibatkan baik dari pemahaman pemerintah dan agama yang salah, serta perlakuan laki-laki yang ingin dominan.

“Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum dan undang-undang, perlindungan warga masyarakat dari kedzaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan serta pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan”

Pernyataan tersebut menggambarkan pemikiran Gus Dur tentang keadilan dan persamaan dalam demokrasi sebagai hal yang telah dijamin dengan universalisme Islam. Adapun bentuk dari persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang sering diungkapkan oleh Gus Dur adalah masalah kepemimpinan perempuan. Ini dapat dipahami karena keadaan perempuan pada waktu itu terkena dampak pembatasan hak oleh pemerintah melalui domestifikasi dan ibuisme negara. bagi Gus Dur representasi perempuan dalam kepemimpinan lembaga menjadi mutlak perlu untuk menjamin kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Karena itu hadir beberapa kebijakan Gus Dur yang mengakomodasi peran publik perempuan yang akan penulis jelaskan di bagian berikutnya.

Pemikiran feminisme Gus Dur dalam tulisannya penulis nilai belum mampu memberi implikasi signifikan bagi perpolitikan perempuan di Indonesia. Ini didasari alasan bahwa tulisan hanya membuat cara pandang baru dan rekomendasi penyelesaian terhadap suatu isu. Ketika Gus Dur telah memiliki kepentingan feminisme tapi belum memiliki kekuasaan, maka pemikiran Gus Dur masih sebatas untuk pembaca dan rekomendasi pemangku kepentingan. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri Gus Dur telah memberi landasan baru untuk memikirkan persoalan kepemimpinan

perempuan yang selama ini menjadi kontroversi di kalangan umat muslim.

Karya Abdurrahman Wahid dengan demikian mengartikan pemikiran feminisme Islam. Implikasi yang diperoleh dari pemikiran Gus Dur mungkin tidak terlalu mengubah kondisi perempuan di Indonesia karena tidak berkekuatan hukum melainkan hanya sosio kultural. Namun implikasi dari pemikiran Gus Dur adalah tindakannya sewaktu menjabat sebagai ketua PBNU dan Presiden RI ke empat.

2. **Feminisme Islam dalam Kepemimpinan Abdurrahman Wahid di PBNU**

Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid mengalami masa transisi dari kondisi kekangan menuju kebebasan perempuan. Ini berkaitan secara konteks sejarah saat perempuan mengalami pembatasan peran ke dalam lingkup domestik. Pada saat Orde baru dipimpin oleh Soeharto, keberadaan perempuan di ranah politik praktis kurang terakomodasi. Sebaliknya, perempuan di masa orde baru diagungkan posisinya sebagai seorang ibu dan istri yang diharuskan berbakti pada suaminya. Di saat yang sama, perempuan di represi melalui pengawasan organisasi. Sehingga gerakan aktivis hanya mampu tampil secara diam-diam. Saah satunya adalah dengan menguatkan identitas perempuan melalui organisasi otonom untuk pengembangan kompetensi.

Penulis pada bagian ini akan mengungkapkan implikasi dari pemikiran feminisme Islam Gus Dur, yaitu pembuatan keputusan sewaktu menjabat sebagai ketua umum PBNU. Organisasi yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid memiliki salah satu organisasi otonom yang mengakomodasi pemberdayaan perempuan, yaitu Muslimat(1946). Organisasi keperempuanan muslim bergerak sesuai dengan ideologi gender dan pergerakan organisasi induknya, dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Seperti disebut oleh Anwar, nilai dan pergerakan perempuan yang dibangun masih seputar nilai feminisme di ranah sosial dan Islam. Keberhasilan muslimat terletak pada penguatan makna Islam pada kaum perempuan. Meskipun tidak tampak dalam lingkup politik praktis, muslimat memberi bekal intelektual dan akses berjejaring organisasi. Pada titik ini muslimat telah menguatkan posisi perempuan melalui organisasi. Anwar mengungkapkan bahwa

muslimat memiliki sikap moderat sebagai jalan perjuangannya di ranah sosial dan politik selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Muslimat dan NU secara keseluruhan mendorong perempuan muslim untuk berkarier dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian maka Muslimat turut mempromosikan perempuan muslim dalam peran publik.⁵⁴

Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, PBNU merumuskan poin-poin yang mengakomodasi dan mendukung hak-hak perempuan. Hasil Muktamar NU ke-28 merumuskan Program Umum NU Masa Khidmah 1989-1994 yang mengungkapkan peran perempuan.

Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat (terutama masyarakat pedesaan) cukup besar. Untuk meningkatkan keberhasilan yang selama ini sudah dicapai., masih diperlukan penyempurnaan di kalangan Muslimat, Fatayat, dan IPPNU, baik dari segi organisasi maupun kualitas kegiatannya, melalui upaya-upaya: konsolidasi organisasi dan meningkatkan usaha sosial yang selama ini telah ditempuh seperti rukun kematian, penyantunan yatim piatu, pemberian beasiswa (anak asuh), pelayanan kepada orang jompo, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan usaha-usaha di bidang kesehatan, terutama yang langsung menyangkut kebutuhan ibu dan anak, seperti BKIA, klinik KB, pembinaan balita, dsb.

Dalam Muktamar NU ke-29 juga disebutkan Program Pokok Pengembangan NU 1994-1999 sektor perempuan:

Melalui Badan Otonom Perempuan (Muslimat dan Fatayat) NU ikut serta mengembangkan dan mendorong peningkatan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, dan beragama dengan pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan. Di samping itu juga ikut serta dalam program-program sosial kemasyarakatan

⁵⁴ Etin Anwar, *Feminisme Islam* (Bandung: mizan, 2021), hlm.199.

seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan budaya secara umum.

Sedangkan keputusan penting NU mengenai hak-hak perempuan terumuskan sebagai hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lombok pada tahun 1997 dalam maklumat tentang “Kedudukan Perempuan dalam Islam (*makanatul mar’ah fil Islam*)”. Maklumat ini memuat lima poin utama, yaitu: *Pertama* pengakuan Islam terhadap keberadaan utuh perempuan sebagai manusia dan oleh karenanya wajib dihormati. *Kedua*, hak perempuan sama dengan laki-laki dalam mengabdikan kepada negara, agama, dan bangsa. *Ketiga*, pengakuan Islam terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kodrati. *Keempat*, pengakuan Islam terhadap peran publik perempuan disamping perannya dalam sektor domestik. *Kelima*, perempuan adalah sejajar dengan laki-laki.⁵⁵

Tiga kebijakan di atas menunjukkan perubahan arus paradigma perempuan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Pada keputusan Muktamar ke-28, terlihat corak organisasi masih berbicara tentang peningkatan agenda sosial organisasi otonom. Belum jelas rangka pembangunan perempuan yang sensitif pada kebutuhan gender. Sekedar penguatan konsolidasi organisasi memang kurang tampak memberikan dampak bagi perjuangan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan seperti halnya semangat feminisme. Pada periode ini seperti dikatakan oleh Anwar, corak yang terbentuk di organisasi otonom perempuan muslim mengacu pada patriarkal dan pengagungan peran keibuan serta kegiatan sosial.

Hasil muktamar ke-28 dapat dikatakan sebagai upaya penguatan organisasi. Sedangkan pada muktamar selanjutnya dapat dimaknai sebagai pemberian restu dan dukungan kepada Muslimat dan Fatayat untuk melaksanakan peran-peran publik disamping mengembangkan kompetensi para perempuan. Peningkatan pengetahuan seperti yang terdapat dalam poin muktamar menjadi tanda bahwa NU secara khusus menaruh

⁵⁵ Siti Musdah Mulia, “Gus Dur Pionir Gerakan Feminisme dalam Organisasi Nahdlatul Ulama,” in *Gus Dur di Mata Perempuan* (Yogyakarta: gading publishing, 2015).

perhatian pada persoalan pendidikan. Abdurrahman Wahid seperti diungkapkan oleh Achidsti memiliki perhatian tinggi terhadap isu pendidikan karena dianggap sebagai kunci kemajuan.

Meskipun demikian, Mulia menilai kebijakan yang dihasilkan dari kedua Muktamar NU masih berbasis pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Pendekatan ini menekankan peran perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan dan tidak menolak adanya fakta perempuan sebagai subordinat. Kaum perempuan diposisikan untuk membentuk peran sesuai status yang disandang. Misalnya, diidentikkan dengan tugas pengayom, pemberi bantuan sosial, dan penjaga moral. Kebijakan demikian dapat ditelusuri dalam Muktamar ke-28 yang menekankan perempuan untuk *meningkatkan usaha sosial*. Sedangkan dalam Muktamar ke-29 tidak ditunjukkan perubahan signifikan karena perempuan masih dianggap harus meningkatkan perannya dalam kehidupan bernegara dan ikut program sosial-kemasyarakatan. Oleh karenanya, Mulia menilai “PBNU belum sepenuhnya mampu membedakan antara kepentingan perempuan dan isu gender (*gender issues*) yang menjadi *concern* kaum feminis”.⁵⁶

Sementara melalui maklumat Kedudukan Perempuan dalam Islam, Nahdlatul Ulama mulai menyelipkan nilai-nilai feminisme seperti hak kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta mengakui peran publik perempuan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi diakomodir dengan adanya persamaan di depan hukum. Dalam maklumat termaktub pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan sejajar. Namun karena pengaruh budaya patriarki maka kesejajaran perempuan dan laki-laki mengalami distorsi hingga menyebabkan kerugian bagi pihak perempuan.

“*Di tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan dunia yang pada prinsipnya menuntut kembali hak-hak sebenarnya dari wanita*”. Pada poin pengakuan ini terlihat Nahdlatul Ulama telah menyadari adanya feminisme di dunia global. Nahdlatul Ulama pun

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, “Gus Dur Pionir Gerakan Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama,” in *Gus Dur Di Mata Perempuan* (Yogyakarta: gading publishing, 2015), hlm.68.

menyadari urgensi adanya reinterpretasi hukum-hukum agama untuk mengatasi distorsi dan mengembalikan prinsip kemuliaan perempuan dalam Islam. Perjumpaan feminisme dan Islam diawali dengan adanya persepsi tentang kebutuhan untuk mengakomodasi pengalaman perempuan dalam membaca teks keagamaan.

“-maka umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan wanita karena distorsi budaya, berdasarkan prinsip-prinsip kemuliaan Islam atas wanita.”

Potongan kalimat tersebut mengisyaratkan di tubuh NU yang saat itu di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid sudah tahu adanya gerakan feminisme Islam. Pergerakan feminisme Islam seperti menuntut interpretasi ulang naskah agama telah diterka oleh feminis global seperti Badran, bahwa telah terjadi gerakan meninjau ulang naskah agama sesuai prinsip gender dan keadilan gender. Mengingat NU adalah organisasi tradisional, maka pengakomodasian prinsip feminisme bisa dikatakan sebagai langkah progresif. Keputusan ini tidak lepas dari kultur NU yang mengutamakan pendapat kiai, salah satunya adalah Abdurrahman Wahid yang kala itu memegang jabatan tertinggi di NU sebagai ketua umum.

Sayangnya Nahdlatul Ulama kurang tepat dalam menerjemahkan *hak-hak sebenarnya dari wanita*. Langkah NU cukup progresif dalam mengakomodasi feminisme, namun seperti apa yang dikatakan dalam maklumat itu sendiri, kultur patriarkal masih mendominasi dan membuat distorsi peran perempuan. Meskipun NU dalam maklumat tersebut mengakui adanya perbedaan bersifat kodrati antara laki-laki dan perempuan, namun NU salah mendefinisikan peran domestik sebagai kodrat perempuan.

“Peran domestik wanita yang hal itu merupakan kesejatian kodrat wanita seperti; sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi lain dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki”

Poin maklumat tersebut harus diakui memandang sifat kodrati perempuan yang tidak dapat digantikan seperti hamil, melahirkan, menyusui. Namun sebagai pendidik yang pertama dan utama sejatinya tidak dimaknai sebagai sifat kodrati karena bisa dilakukan baik oleh laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu. Menjadi mitra sejajar dan pengakuan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengartikan bahwa selain nilai kodrati, keduanya memiliki peran saling membantu dan mengisi. Seperti yang diungkapkan Mulia, poin maklumat tersebut masih bias gender. Meskipun NU telah mengakomodasi prinsip-prinsip feminisme mengenai hak kesetaraan namun NU masih memiliki kekurangan dalam menerjemahkannya.

Selain dengan rangkaian kebijakan di atas, ada juga upaya sosial edukasi yang dilakukan Gus Dur bersama Musdah Mulia terkait pemahaman feminisme di Indonesia. pada tahun 1994, Gus Dur dan Mulia diberikan amanah dari UNICEF untuk mempromosikan kesetaraan gender. Sayangnya ketika mensosialisasikan kesetaraan gender di pesantren, respon yang didapat negatif. Pada masa itu gender masih dianggap sebagai konsep barat dan anti Islam. Sebagai penyelesaian akhirnya kata kesetaraan gender diubah menjadi mitra sejajar. Gus Dur dan Mulia melakukan upaya pribumisasi kesetaraan gender, atau yang disebut Achidsti sebagai pribumisasi gender.

Penggunaan kata yang mudah dipahami adalah bentuk retorika dan dialektika feminisme. Ketika feminisme mulai memasuki wilayah lokal, maka penyebarannya akan menggunakan kalimat-kalimat yang merakyat. Seperti diungkapkan oleh Anwar yang setuju dengan Badran, gerakan feminisme Islam telah ada di berbagai daerah namun dengan bahasa dan bentuk berbeda agar bisa diterima masyarakat. Penggunaan mitra sejajar seperti yang dilakukan oleh Gus Dur dan Mulia berhasil dan membuat “ulama jadi *support system*-nya”.⁵⁷

Rangkaian kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa dirinya memiliki pemikiran feminisme mumpuni. Gus Dur mampu menerka kebutuhan perempuan akan adanya tafsir teks agama yang

⁵⁷ Achidsti, *Gender Gus Dur*, hlm.33.

lebih berprespektif gender. Kebutuhan tersebut didasari dari adanya fakta kaum perempuan masih tertinggal di era orde baru.

Upaya Abdurrahman Wahid untuk membangun kesetaraan gender di NU belum terimplementasi dengan maksimal. Terkait dengan ini, Mulia mengungkapkan alasan mengapa upaya memajukan perempuan di NU kurang mendapat tempat di organisasi sendiri. *Pertama*, isu feminisme belum dianggap sebagai isu strategis dan prioritas. *Kedua*, banyak kaum perempuan belum tahu hak-hak mereka yang dijamin oleh agama. Hal ini karena umumnya tradisi fiqh ditafsirkan dan diajarkan oleh kaum laki-laki, sehingga besar anggapan kepentingan kaum laki-laki menjadi dominan dalam pembahasannya.⁵⁸

Masalah pertama yang mendasari sulitnya isu feminisme menjadi prioritas pernah disinggung oleh Gus Dur secara langsung. Alasannya adalah kiai NU yang masih kolot. Konteks dalam penuturan Gus Dur adalah tanggapan untuk pertanyaan yang dilontarkan oleh Lily Zakiyah Munir terkait kekosongan perempuan sebagai pengurus di NU.

*“Pada waktu itu Gus Dur masih menjabat sebagai ketua umum PBNU dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Salah seorang aktivis yang hadir adalah Lily Zakiyah Munir (alm.) Ia menanyakan mengapa struktur kepengurusan PBNU tidak mengakomodir perempuan masuk dalam struktur kepengurusannya. Gus Dur dengan enteng menjawab bahwa sebagai orang yang masih terhitung family dan orang NU, Lily lupa di NU masih banyak kyai NU yang kolot, nanti kalau kyai-kyai yang kolot di NU sudah berkurang, Lily bisa mengajukan perempuan menjadi pengurus”.*⁵⁹

⁵⁸ Musdah Mulia, “Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama’,” *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 37, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.72>, hlm.54.

⁵⁹ Sadli, “Gus Dur ada Hati sama Perempuan.”

Jika dikaitkan dengan maklumat, pengakuan sektor publik perempuan seharusnya dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan duduk dalam kursi kepengurusan.

3. Feminisme Islam dalam Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden

Feminis Indonesia menganggap Abdurrahman Wahid sebagai figur yang berperan penting dalam usaha penegakan kesetaraan gender. Bukan hanya dalam organisasi yang dinaungi, tapi di Indonesia secara keseluruhan. Melalui jabatannya sebagai presiden keempat Gus Dur mampu membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bernilai penting bagi perjuangan feminisme. Pada pembahasan ini, akan penulis uraikan peran penting Abdurrahman Wahid dalam mengakomodasi feminisme saat menjabat sebagai presiden.

Kebijakan politik praktis yang dilakukan oleh Gus Dur memiliki implikasi besar bagi kesetaraan gender di Indonesia. Seperti diungkapkan oleh Achidsti, Gus Dur melalui peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan telah membuka pintu bagi perempuan Indonesia untuk berkarya di sektor publik, terutama di bidang politik. Penulis memasukkan kebijakan politik praktis Gus Dur dalam penelitian ini dengan alasan bahwa kebijakan itu menjadi implementasi dari pemikiran feminisme Gus Dur. Seperti dalam sub bab sebelumnya, penulis menjabarkan pemikiran feminisme Gus Dur melalui kepemimpinannya di NU dan respon yang diberikan pada ketertinggalan perempuan. Kebijakan yang dikeluarkan menjadi respon dari ketertinggalan perempuan di Indonesia secara umum. Menyadari akan hal itu, Gus Dur membuat peraturan ketika menjadi presiden.

Adanya respon dan tindakan yang dilakukan Gus Dur menandakan bahwa Gus Dur adalah seorang feminis muslim. Anggapan itu sesuai dengan pendapat Gumiandri yang mengutip pengertian feminisme dari Yanti Mukhtar, yaitu feminisme sebagai gerakan dan pemikiran yang didasari dari kesadaran akan adanya ketertindasan terhadap kaum perempuan lalu karena kesadarannya seseorang melakukan aksi untuk mengatasi masalah itu. Dari pengertian Mukhtar tidak mengatakan keharusan feminis sebagai perempuan.

Karena Gus Dur telah memiliki kesadaran tertinggalnya kaum perempuan, maka Gus Dur dapat disebut sebagai feminis.⁶⁰

Kebijakan pertama yang ingin penulis ungkap adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. Untuk pertama kalinya, istilah gender terdapat dalam peraturan yang pada dasarnya menjadi arah kebijakan negara. Mudah mengungkapkan GBHN di era Abdurrahman Wahid ini “mengakui secara gamblang bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia masih bersifat *subordinatif*”. Pemerintahan Abdurrahman Wahid menjadi pintu gerbang untuk kesetaraan gender dan gerakan feminisme Indonesia.⁶¹

Adanya peran perempuan yang bersifat subordinatif dapat dipahami dalam konteks sosio historis pada masa orde baru. Pemerintahan Soeharto menkankan budaya istri ikut suami juga pengekanan terhadap aktivisme perempuan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan orde baru setidaknya telah mengakar pada masyarakat sehingga banyak orang memahami posisi perempuan memang secara kodrati ikut suami. Pada masa ini belum diakomodir peran anak dan remaja perempuan.

Penulis akan menjabarkan tentang perspektif gender dalam GBHN masa Gus Dur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 sebagai penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999. Peraturan ini disahkan pada 20 November 2000 oleh Abdurrahman Wahid. Program pembangunan lima tahun ini memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan gender dan menjadikan feminisme sebagai isu strategis. Gender terdapat dalam rumusan 5 agenda pokok pembangunan, tepatnya pada pembangunan sistem politik yang demokratis dan pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Dalam sistem politik yang demokratis disebutkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari langkah penting yang harus ditempuh.

⁶⁰ Septi Gumiandri, “Gus Dur; Sosok Feminis Muslim Laki-Laki,” in *Gus Dur Di Mata Wong Cirebon* (Yogyakarta: Pilar Media, 2010), hlm.107.

⁶¹ Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*.

Representasi perempuan dalam politik merupakan salah satu masalah penting dalam feminisme. Seperti yang terjadi pada gelombang pertama feminisme, Tong mengklasifikasi tindakan menuntut hak dalam politik dalam feminisme liberal yang muncul di gelombang pertama feminisme. Feminisme liberal dengan fokus utama hak-hak sipil dan sosial perempuan pertama kali dicetuskan dalam *declaration of sentiment* pada 1848. Deklarasi ini menuntut perubahan kultur sosial dan hukum mengenai keberadaan perempuan dalam sektor publik. Tong beragumen pentingnya hak sipil dengan menempatkan perempuan dalam parlemen untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Ini berhubungan dengan kepentingan perempuan yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam perubahan sistem, struktur, dan etika politik ramah gender.⁶² Pemikiran feminisme Gus Dur dengan demikian dapat dikatakan dipengaruhi oleh feminisme liberal. Tampak dari sikap Gus Dur yang menghendaki adanya kesetaraan gender di bidang politik.

Dengan hadirnya perhatian pemerintah, maka Gus Dur secara khusus mengharap adanya representasi lebih aktif dari kaum perempuan untuk membentuk iklim pemerintahan yang ramah gender. Perempuan diharapkan tidak lagi menjadi pihak yang menerima kebijakan, namun terlibat secara aktif pada proses pengambilan keputusan. Hal ini berbanding terbalik dengan pemerintahan orde baru yang menghendaki perempuan untuk tetap berada di sektor domestik dengan romantisme ibuismenya. Seperti yang telah penulis paparkan dalam kajian teori, representasi perempuan adalah salah satu tuntutan yang dibawa dari gerakan feminisme dan politik. Gus Dur telah mengaplikasikan sifat politik feminisme dengan memberikan landasan konstitusional bagi perempuan di pemerintahan.

Agenda pokok pembangunan ke-empat membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya berisikan pemberdayaan perempuan dalam salah satu agenda cakupannya. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengarahkan kebijakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dengan melibatkan pemerintah dan organisasi masyarakat. Agenda ini termasuk baru mengingat orde baru

⁶² Tong, *Feminist Thought*, hlm.21.

lebih mengurus peran daripada pemberdayaan, ditunjukkan dari nama Kementerian Urusan Peranan Wanita.

Pengarusutamaan gender merupakan konsep kebijakan publik yang mengakomodasi kepentingan berbeda bagi perempuan dan laki-laki dalam setiap pembuatan keputusan. Economic and Social Council PBB tahun 1997 mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai proses pengakomodasian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk setiap kebijakan, tindakan, dan program, termasuk program legislasi di semua tingkat. Melalui strategi menjadikan pengalaman laki-laki dan perempuan sebagai dasar dari perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial sehingga baik laki-laki dan perempuan memiliki peran dan manfaat yang sama dari pembangunan. Pengarusutamaan gender adalah kepanjangan dari keputusan di *Beijing Platform for Action* 1995.

Kebijakan pengarusutamaan gender yang diterapkan mengubah pendekatan pembangunan yang diterapkan pada periode orde baru dari sebelumnya Gender and Development/GAD (Gender dan Pembangunan). Anwar menunjukkan perempuan baru masuk dalam orde baru sebagai isu yang perlu diakomodir bukan sekedar mengatur peran sebagai istri ketika mulai bermunculan gerakan dari organisasi keperempuanan untuk menyuarakan agendanya sendiri. tepatnya pada GBHN 1993, orde baru mulai mengenalkan GAD melalui konsep kemitrasejajaran. Pada umumnya orde baru menghendaki adanya “kesamaan hak, kewajiban, dan kesempatan berdasarkan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menolong dalam konteks pembangunan di berbagai pihak”.⁶³ Perlu disadari belum ada akomodasi perempuan dalam politik dan pembuatan keputusan. Sehingga yang terjadi adalah gerakan masyarakat akar rumput untuk menyebarkan feminisme dan isu perempuan. Belum tersentuh isu perempuan sebagai representasi di pemerintahan.

Kondisi berbeda tampak di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menghendaki adanya upaya reformasi hukum dan budaya guna memperlancar perjuangan kesetaraan gender. GBHN 1995 menunjukkan adanya realitas

⁶³ Anwar, *Feminisme Islam*, hlm.166.

ketidakadilan gender di Indonesia yang berimplikasi pada rendahnya sumber daya perempuan. Adapun akar masalah dari ketidakadilan gender di Indonesia disebutkan sebagai dampak dari rendahnya partisipasi, terbatasnya akses, dan kurangnya manfaat yang dirasakan oleh perempuan dalam pembangunan. Dengan demikian, pemerintah meniscayakan kehadiran perempuan di ranah politik pemerintahan sebagai langkah kesetaraan gender. Urgensi perempuan dalam pemerintahan diungkapkan dengan alasan pemerintah butuh pengalaman, aspirasi, dan kepentingan perempuan untuk mendukung terciptanya keadilan dan manfaat yang sama bagi setiap rakyat. Penulis setuju dengan Achidsti, posisi Gus Dur sebagai presiden membuatnya bisa merumuskan dan meresmikan kebijakan sesuai dengan pemikirannya. Dalam hal ini adalah pemikiran feminismenya.

Gus Dur menunjukkan perhatiannya terhadap kepemimpinan politik perempuan. Pada masanya melalui GBHN yang mengubah perepektif gender dan pembangunan menjadi *gender mainstreaming*. Konsekuensi nyata dari pemberlakuan pengarusutamaan gender adalah representasi perempuan dalam setiap lini pemerintahan. Ini dilakukan untuk menjamin keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan mengelaborasi pengalaman perempuan. Sehingga diharapkan implikasinya tidak berhenti pada keterwakilan saja, tapi semua kebijakan agar dapat meningkatkan derajat perempuan dalam kehidupan bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Gus Dur seperti GBHN di atas menggambarkan ciri Gus Dur sebagai seorang feminis dengan tekad mengubah norma budaya yang merugikan hubungan perempuan dan laki-laki.

Kebijakan selanjutnya yang akan penulis bahas adalah salah satu akibat dari adanya GBHN, yaitu Intruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut dari GBHN, Inpres ini memberikan intruksi kepada seluruh lembaga untuk mengakomodasi keberadaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian maka dapat dikatakan Gus Dur dan pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan posisi kepemimpinan politik perempuan. Menurut Soetjipto, Inpres Pengarusutamaan gender adalah

kebijakan pertama yang menjadi harapan bagi kemajuan perempuan di Indonesia.⁶⁴

Bila ditinjau dari aspek historis, keberadaan perempuan dalam kancah politik di Indonesia masih sangat terbelakang. Hal ini ditunjukkan salah satunya dari jumlah perempuan dalam parlemen. Penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai politik perempuan di era sebelum pemerintahan Gus Dur serta menganalisisnya untuk mendapat pemahaman mengapa kebijakan pengarusutamaan gender sangat krusial. Semenjak Pemilu tahun 1955, peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu tidak menunjukkan signifikansi. Prosentase perwakilan perempuan dalam parlemen bertahan di kisaran 6 hingga 13 persen.⁶⁵

Tabel 4.4. Jumlah perempuan dalam parlemen dari Pemilu tahun 1955-1999

Tahun	Anggota perempuan	Jumlah Total	Persentase anggota perempuan
1955	17	272	6,25
1971	36	460	7,83
1977	29	460	6,30
1982	39	460	8,48
1987	65	500	13
1992	62	500	12,4
1997	54	500	10,8
1999	45	500	9

Rendahnya partisipasi politik perempuan di Indonesia diungkapkan oleh Soetjipto berhubungan dengan cara pandang masyarakat dan partai politik yang belum memandang partisipasi perempuan sebagai isu penting. Banyak hambatan ditemui perempuan ketika masuk dalam partai politik, mulai dari hambatan bersifat budaya, agama, hingga struktur partai.⁶⁶

Pada masa orde baru seperti yang terlihat dalam tabel, partisipasi perempuan meningkat sampai angka 13 persen.

⁶⁴ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm.276.

⁶⁵ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm.74.

⁶⁶ Soetjipto, hlm.78.

meskipun demikian, peran perempuan masih diatur sesuai dengan keinginan Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Representasinya telah diatur sehingga kurang membawa isu perempuan. Pemilu tahun 1999 dianggap oleh Soetjipto sebagai pemilu paling demokratis dibanding masa Soeharto. Perwakilan perempuan memang menunjukkan kemunduran secara kuantitas, namun hasil demokratis yang diperoleh menjadi gambaran nyata keadaan politik perempuan di Indonesia.

Tahun 1999 menjadi momen dimana pergerakan feminisme mulai banyak berlangsung. Kesadaran masyarakat tentang perlunya perempuan di parlemen untuk menyuarakan hak-hak mulai ada. Momentum ini menurut Soetjipto memberi semangat baru bagi pergerakan feminisme dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Ini karena Gus Dur dikenal sebagai sosok yang pluralis dan humanis. Kehadirannya sebagai pemimpin di Indonesia banyak diharapkan membawa angin segar. Dengan hadirnya GBHN yang untuk pertama kalinya memperkenalkan gender dan pengarusutamaan gender dan Inpres Pengarusutamaan Gender, Gus Dur telah menjawab kebutuhan dukungan feminisme.

Penulis setuju dengan yang diungkapkan oleh Achidsti tentang ketepatan Gus Dur untuk menerbitkan intruksi presiden. Meskipun lebih lemah daripada Undang-Undang, langkah intruksi presiden dinilai penting melihat urgensi jaminan hukum tentang pengarusutamaan gender. Pada masa awal reformasi politik di Indonesia masih bergejolak dan Abdurrahman Wahid tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan kompromi dengan DPR. Masalah dengan DPR diperparah dengan kurangnya kursi kader PKB di DPR sehingga dukungan yang didapat Gus Dur kurang. Kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur pada masanya termasuk kontroversial dengan membawa isu utama HAM, termasuk menegakkan hak-hak perempuan. Karena itu Gus Dur lebih memilih menerbitkan peraturan berbentuk inpres yang kewenangan seluruhnya ada di tangan presiden. Ketepatan pemilihan Inpres juga didasari dari cara pikir DPR yang belum memandang keterwakilan perempuan sebagai isu strategis. Sehingga pembuatan Inpres ini menjadi alternatif

kebijakan publik untuk mengatasi masalah genting yang membutuhkan waktu pemecahan segera.⁶⁷

Pemikiran feminisme Gus Dur menjadi latar belakang dari kebijakan pengarusutamaan gender. Meskipun memiliki kekuatan untuk membuat peraturan, nyatanya peraturan tidak akan terwujud jika pembuat keputusan tidak memiliki kepentingan. Adapun kepentingan Gus Dur dalam pembuatan Inpres Pengarusutamaan Gender diidentifikasi oleh Achidsti menjadi dua hal, penegakan HAM dan feminisme. Kepentingan kedua, feminisme, menjadi salah satu gerakan pokok Gus Dur dalam penegakan HAM. Ini menandakan pemikiran feminisme Gus Dur lebih condong pada pentingnya perempuan di politik. Dapat dipahami penegakan HAM berimplikasi pada demokrasi yang mengharuskan seluruh masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan, tak terkecuali perempuan.

Penulis menyimpulkan pemikiran feminisme Gus Dur sejalan dengan pemikiran Badran yang menjadikan politik sebagai salah satu bagian penting dalam feminisme Islam. Perempuan muslim tidak membutuhkan sekedar segi teologis, tapi lebih banyak kesempatan dalam politik. Badran berargumen, negara patriarki baik itu berdasarkan syariat ataupun sekuler, semuanya digerakkan lewat kekuatan politis. Perjuangan feminisme hanya akan berhenti jika tidak ada kekuasaan politik.⁶⁸ Inilah yang coba diubah Gus Dur. Kondisi Indonesia yang pada masa pasca reformasi telah bermunculan gerakan feminisme lewat diskusi dan gerakan sosial harus mendapat legitimasi dalam kehidupan bernegara.

Tidak berlebihan jika penulis menganggap Gus Dur sebagai salah satu pionir feminisme Islam di Indonesia. Penulis menyadari feminisme Islam memang seperti yang disebutkan oleh Anwar, telah ada bahkan saat penjajahan di Indonesia, yaitu melalui perlawanan melawan penjajah dan gerakan sosial organisasi. Namun seperti pendapat Badran, feminisme Islam harus digerakkan untuk mencapai kekuasaan politik. Melihat kembali ke masa Gus Dur, pemerintahannya jadi yang pertama untuk mengakomodasi keberadaan

⁶⁷ Achidsti, *Gender Gus Dur*, hlm.89-91.

⁶⁸ Badran, "An Historical Overview of Conferences on Islamic Feminism: Circulations and New Challenges."

perempuan di semua sektor publik, terutama pemerintahan. Ini berbanding terbalik dari kondisi perempuan di masa orde baru.

Kembali ke awal, maka dapat disimpulkan GBHN di masa Gus Dur berimplikasi pada seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah. Penulis menilai adanya Intruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai implikasi dari GBHN. Sebagai tindak lanjut dari inpres ini, maka semua instansi dan departemen diinstruksikan untuk mengakomodasi pengarusutamaan gender. Dapat dilihat melalui adanya peraturan dan kebijakan yang menjadikan Inpres Pengarusutamaan Gender sebagai landasannya.

Penulis menekankan bahwa Gus Dur menjadi pembuka bagi peran politik perempuan. Namun upaya Gus Dur itu harus diimbangi dengan usaha setiap kalangan masyarakat, baik itu pemangku kepentingan, *civil society*, sampai perempuan itu sendiri. Penelitian ini tidak mengkaji pengaruh pemikiran Gus Dur kepada perempuan secara personal. Meskipun begitu penulis akan menjabarkan data mengenai presentase keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagai gambaran peran politik perempuan.

Tabel 4.5. Persentase Perempuan dalam DPR RI Setelah Era Abdurrahman Wahid (2004-2019)⁶⁹

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2004-2009	61	11,09	498	89,3
2009-2014	101	18,03	459	82,14
2014-2019	97	17,32	481	82,68
2019-2024	120	20,87	455	79,13

⁶⁹ Direktorat Politik dan Komunikasi, “Jalan Keterwakilan Perempuan,” ditpolkom.bappenas.go.id, 2018, <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=784>.

Representasi perempuan dalam parlemen menunjukkan keterwakilan perempuan yang jauh dari harapan. Kebijakan pengarusutamaan gender hendaknya didukung dengan memadainya sumber daya manusia, dalam hal ini perempuan, untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan. Meskipun Inpres Pengarusutamaan Gender memiliki implikasi berupa keharusan setiap lembaga mengakomodasi peran perempuan, data pada tabel di atas menunjukkan belum ada peningkatan kuantitas berarti dalam peran politik perempuan di parlemen. Penggambaran representasi perempuan dalam parlemen DPR RI belum dapat memberi gambaran lebih nyata tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai kepemimpinan perempuan secara personal yang terinspirasi dari pemikiran feminisme politik Gus Dur.

